



RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

JL. SEI BATUGINGGING NO 06 MEDAN Kec. Medan Baru Kode Pos : 20154
Website : <http://dkp.sumutprov.go.id/>
Facebook : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumut
Telp : 061-4568819/4153335

mswordcoverpages.com

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, dimana Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Diharapkan Renja ini digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Utara.

Penyusunan Renja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Renja ini berisikan gambaran tentang kegiatan/program/sub kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2023 dan yang akan direncanakan untuk tahun 2025, hasil-hasil yang dicapai serta masalah yang dihadapi, tujuan dan sasaran program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2023 serta dana indikatif dan sumber dana yang dibutuhkan dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan guna meningkatkan kinerja Program.

Disadari bahwa Renja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan Renja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara selanjutnya.

Akhirnya, saya ingin mengajak semua pihak, marilah kita saling bahu membahu dengan semangat kemitraan, kita selenggarakan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Semoga upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat, hidayah, dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan
Provinsi Sumatera Utara

Hamdan Sukri Siregar, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19770826 200312 1 004

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2023	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD	13
2.1.1 Program Pengolahan Perikanan Tangkap	14
2.1.2 Program Pengolahan Perikanan Budidaya	15
2.1.3 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	16
2.1.4 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	17
2.1.5 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	18
2.1.6 Pengarusutamaan Gender, GAP dan GBS System	19
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	41
2.3 Analisis Capaian Kinerja Keuangan	43
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	45
2.5 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	59
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat	78
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	80
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	80
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	82
3.2.1 Tujuan	83
3.2.2 Sasaran	83
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	85
3.4 Program Kerja NEMBUSH (Nelayan Membangun Sumatera Utara Hebat	86
3.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun secara GAP, GBS dan TOR/ KAK Pelaksanaan Kegiatan	93
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	103
4.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	103
4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja	104
BAB V PENUTUP	125
LAMPIRAN.	127

BAB I PENDAHULUAN

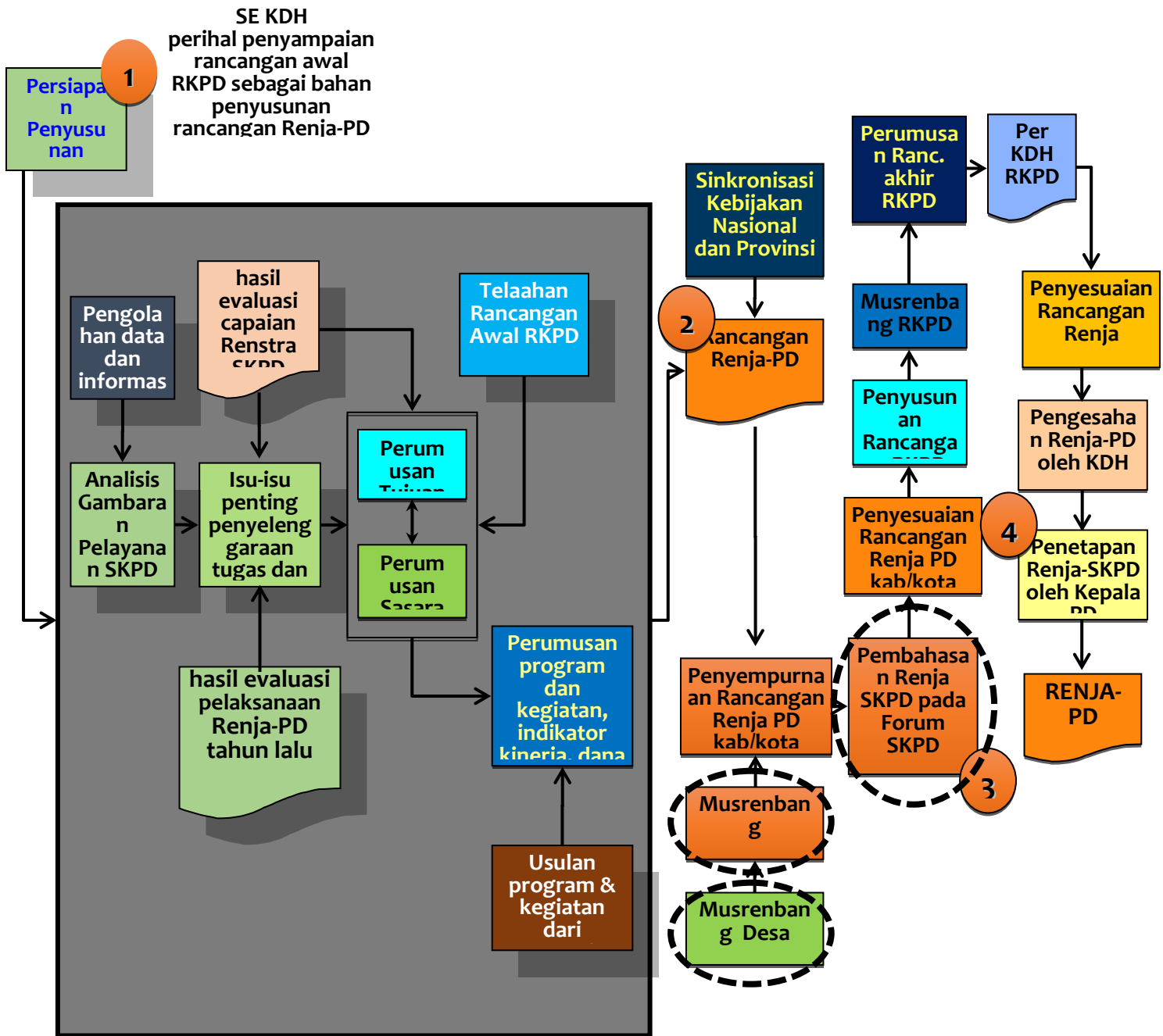
I.1. Latar Belakang

Proses dan tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2023. Renja Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara diselaraskan dengan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), serta menerapkan peraturan perundangan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kemudian disusul dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Peraturan ini mengatur perencanaan pada nomenklatur program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENJA PD



Gambar 1. Alur Proses Penyusunan Renja Tahun 2025

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kesempatan pada daerah untuk mengatur dan

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

menyelenggarakan urusan pemerintah dan urusan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk kepentingan masyarakat berdasarkan potensi daerahnya. Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang Perencanaan Jangka Panjang. Perencanaan Jangka Menengah maupun Perencanaan Tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPN). Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Upaya pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara dilandaskan atas potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pemanfaatan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana serta sarana pendukung produksi. Faktor pendukung produksi juga meliputi peraturan

perundang-undangan yang kondusif pendampingan. Selanjutnya, pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara juga merupakan upaya pemberian berbagai alternatif pilihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan (welfare) hidupnya, sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan basis komoditas unggulan yang kompetitif berlandaskan kemampuan regional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Apabila peluang dan prospek yang terbuka dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan permasalahan yang dihadapi dapat diatasi secara bertahap maka bukan suatu pilihan yang salah, jika sektor kelautan dan perikanan dijadikan andalan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara saat ini dan dimasa yang akan datang. Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Sumatera Utara untuk Tahun 2025. Dimana Renja merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD Provinsi Sumatera Utara yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sehubungan dengan itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu instansi membuat dan menyusun dokumen perencanaan dalam periode 1 (satu) tahunan berupa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Renja tahun 2025 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, sekaligus merupakan Rencana Kerja sesuai dengan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026. Rencana Kerja disusun berdasarkan usulan-usulan dari Kabupaten/Kota melalui forum perangkat daerah, Musrenbang Kabupaten/Kota dan Provinsi dan pokok-pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang di input kedalam aplikasi SIPD. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam hal ini kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sebagai instansi yang mengurus bidang Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud di atas untuk tahun 2025 melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden No 05 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
18. Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, yang berisikan Pedoman dalam rangka memantapkan manajemen pemerintah dan pembangunan yang akuntabel dan terwujudnya Good Government;
19. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
 26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
 27. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
 28. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan proses pemetaan (*mapping*) kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kegiatan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dan sebagai upaya untuk mengakomodasi 4 (empat) tujuan, yaitu:

1. Tujuan ekonomi, yaitu mengembangkan sistem pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
2. Tujuan ekologis, yaitu melindungi dan memperbaiki ekosistem wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

3. Tujuan sosial, yaitu memulihkan dan menjamin hak dan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
4. Tujuan administratif, yaitu meminimalkan adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sehingga tercapai suatu keterpaduan dan berkelanjutan program.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

- 2.1 **Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan PD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD ;
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**, rencana pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang terdapat didalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2019-2023.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah penjabaran Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas sebagai Pelaksana Teknis Pembangunan Urusan Pilihan di Bidang Kelautan dan Perikanan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2023. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis tahun 2024-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program/kegiatan yang berdasarkan sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025.

Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran terhadap Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan melalui tahapan sebagai berikut :

2.1.1.1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Target produksi perikanan tangkap Sumatera Utara yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 sebesar 459.403,89 ton. Selama tahun 2023, realisasi produksi perikanan tangkap 482.343,21 ton atau 104,99% dari target yang ditetapkan. Bila dibandingkan produksi perikanan tangkap pada tahun 2021, produksi perikanan tangkap tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 90.850,09 ton.

**TABEL 1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**

No	Capaian Indikator	Target 2023	Realisasi	Persentase %
1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	459.403,89	482.343,21	104,99

Penurunan jumlah produksi perikanan tangkap ini disebabkan karena beberapa faktor selama tahun 2021. Awal tahun 2021, masih adanya pandemi covid 19 sehingga belum maksimalnya aktivitas perikanan, sehingga nelayan tidak melakukan aktifitas melaut karena adanya peraturan dari pemerintah dan kekhawatiran terjangkit Covid-19. Akibatnya, produksi perikanan tangkapan nelayan mengalami penurunan. Selain itu, harga ikan hasil tangkapan nelayan juga mengalami penurunan karena banyak restaurant yang tidak beroperasi selama covid-19. Harga ikan hasil tangkapan nelayan turun drastis mencapai 50 %. Hal ini tentunya tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan selama melaut untuk menangkap ikan.

Untuk memacu peningkatan volume produksi perikanan tangkap, ke depan perlu dilakukan upaya dan kegiatan antara lain optimalisasi operasional bantuan sarana penangkapan ikan (kapal dan alat tangkap), peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, Optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap di pusat-pusat pendaratan termasuk tangkahan, Penguatan pendataan dan penambahan SDM pengumpulan data di area WPP 571 dan WPP 572.

2.1.2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Target produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 sebesar 216.996 ton. Realisasi produksi perikanan budidaya Sumatera Utara pada tahun 2023 sebesar 218.998 ton atau 100,92 % dari target yang ditetapkan.

**TABEL 2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**

No	Capaian Indikator	Target 2023	Realisasi	Persentase %
1	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	216.996	218.998	100,92

Bila dibandingkan produksi perikanan budidaya tahun 2022, produksi perikanan budidaya tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,5%. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi capaian produksi

tersebut yaitu, bantuan benih ikan dan benur udang kepada pembudidaya ikan dan udang serta pemberian bantuan pakan ikan/udang kepada pelaku usaha budidaya ikan di beberapa kabupaten/kota Sumatera Utara. Dalam mengantisipasi harga pakan ikan yang melonjak karena produsen pakan ikan menaikkan harga disebabkan covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020, maka Provinsi Sumatera Utara memberikan stimulus kepada pelaku usaha pembudidaya ikan dalam rangka pemulihan ekonomi di Sumatera Utara.

2.1.3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

**TABEL 3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

No	Capaian Indikator	Target 2023	Realisasi	Persentase %
1	Kawasan Konservasi Perairan (Ha)	165.000	166.167,92	100,71
2	Rehabilitas Ekosistem Terumbu Karang (m ²)	102.031	102.031	100
3	Rehabilitas Ekosistem Mangrove (Ha)	50	51	102

1. Pengembangan Mata Pencanharian Alternatif Bagi Masyarakat Pesisir

Kegiatan Pengembangan Mata Pencanharian Alternatif Bagi Masyarakat Pesisir merupakan kegiatan bagi para nelayan sebagai pencaharian alternatif ketika nelayan tidak bisa melaut untuk menangkap ikan dengan cara budidaya ikan lele dengan menggunakan kolam terpal. Tahun 2022, kegiatan ini dilaksanakan di 2 kab/kota yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Nias Utara. Adapun bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa kolam terpal, 250 m2, benih ikan lele 50.108 ekor dan pakan 3 ton.

2. Transplantasi Terumbu Karang

Kegiatan Transplantasi terumbu karang merupakan kegiatan dalam rangka menumbuhkan kawasan terumbu karang kritis. Realisasi transplantasi terumbu karang seluas 1.079 m2. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

3. Rehabilitasi Kawasan Kritis Mangrove

Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Kritis Mangrove bertujuan untuk mengurangi lahan kritis mangrove 10 ha. Kegiatan ini telah dilaksanakan di 3 Kabupaten/Kota yaitu di Kabupaten Deli Serdang (3 ha), Kabupaten Langkat (4 ha) dan Kabupaten Serdang Bedagai (3 ha) dengan penanaman 40 000 bibit tanaman rhizopus dan 4000 batang bambu ajir.

4. Sosialisasi Pengelolaan Kawasan konservasi.

Kegiatan Sosialisasi Kawasan konservasi bertujuan untuk mensosialisasikan penjelasan teknis bagaimana mengelola kawasan konservasi. Kegiatan ini telah dilaksanakan di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

5. Monitoring Kesehatan Karang.

Kegiatan Monitoring Kesehatan Karang telah dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan cara memonitoring terumbu karang yang ada didasar perairan oleh para tenaga ahli menyelam dengan memantau kesehatan karang, apakah tumbuh dengan baik atau terjadi kerusakan karang akibat pengeboman ikan atau penangkapan ikan.

2.1.4. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut.

1. Operasional kapal pengawas perikanan di laut.

Operasi kapal pengawas perikanan di laut dilaksanakan sebanyak 12 kali di wilayah perairan laut Sumatera Utara. Realisasi kegiatan operasi kapal pengawasan di laut mencapai 100 % dengan Rp.503.687.100

2. Operasional kapal perikanan di Danau Toba.

Operasional kapal perikanan di danau Toba telah dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota yang mengelilingi kawasan danau toba. Realisasi kegiatan ini mencapai 100% dan anggaran sebesar Rp.145.989.900.

3. Pemantauan dan fasilitasi penyelesaian konflik nelayan di Sumatera Utara

Kegiatan Pemantauan dan fasilitasi penyelesaian konflik nelayan di Sumatera Utara memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 1 kali pemantauan dari target sebesar 1

kali pemantauan dan persentase capaian anggaran sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 41.753.000,-dari total anggaran sebesar Rp. 41.753.000,-.

4. Pengawasan Usaha Budidaya Ikan Air payau/tambak ikan Sumatera Utara dan udang di Sumatera Utara.

Kegiatan Pengawasan Usaha Budidaya Ikan Air payau/tambak ikan dan udang di Sumatera Utara memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja pada 5 Kabupaten/Kota dari target sebanyak 5 Kabupaten/Kota pemantauan dan persentase capaian anggaran sebesar 97,93 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp 72.973.000,-dari total anggaran sebesar Rp 74.511.700,-.

5. Docking dan Pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan.

Kegiatan Docking dan Pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 2 unit dari target sebanyak 2 unit dan persentase capaian anggaran sebesar 62,39 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp 33.055.400,-dari total anggaran sebesar Rp 52.977.800,-.

2.1.5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

**TABEL 4. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN
PRODUKSI PERIKANAN**

No	Capaian Indikator	Target 2023	Realisasi	Persentase %
1	Angka Konsumsi Ikan Masyarakat. (Kg/Kapita/Tahun)	49,79	51,32	103,1

Tercapainya angka konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2023 dikarenakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara gencar melaksanakan program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang dilaksanakan di berbagai kab/kota se-Sumatera Utara terutama pada anak-anak dalam rangka meningkatkan kecerdasan anak dalam pendidikan, upaya mengurangi stunting dan meningkatkan imun

tubuh selama masa pandemi covid 19. Selain itu, beberapa kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang mendukung tercapainya angka konsumsi ikan masyarakat antara lain : kegiatan Hari Makan Ikan yang bekerja sama dengan dengan Start Up Aqua-Tech yaitu e-Fishery.

2.1.6. Pengarusutamaan Gender (PUG), Gender Budget Statement (GBS) dan Gender Analysis Pathway (GAP) System dalam perencanaan dan realisasi anggaran tahun 2023.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya. Sedangkan keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi. PUG merupakan strategi pembangunan yang diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan sehingga bermanfaat untuk semua. PUG menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat serta semua elemen di tingkat pusat dan daerah.

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan terkoordinasi, di dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan

kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan. Gender Budget Statement (GBS) dan Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan salah satu analisis gender yang perlu dilakukan pada tahapan awal proses perencanaan dan penganggaran responsif gender. Proses ini merupakan bagian kunci dari pengarusutamaan gender (PUG). Untuk melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) diperlukan pemahaman baik pada tingkat konsep maupun implementatif oleh pemegang kebijakan maupun pelaksana program atau kegiatan. Oleh karena itu diperlukan pelatihan untuk memberikan pemahaman secara utuh kepada mereka bagaimana PPRG dijalankan. Prinsip utama Perencanaan serta Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah adanya analisis gender terhadap setiap kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2023
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	DINAS KELAUTAN PERIKANAN								
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan		97,92	80	80	100	100	97,33
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	100	99,37	100	100	100	100	99,56
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100	100	99,71
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	100	99,32
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan	100	97,27	100	100	100	100	96,25

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		perangkat daerah							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN; Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	128 orang/bln	128 orang/bln	130 Orang/Bulan	130 Orang/Bulan	100	100	96,19
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lamanya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	100	99
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Lamanya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	100	98,96
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	100	99,86
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penilaian barang milik daerah SKPD	100	100	100	100	100	100	99,47
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang diinventarisasi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	100	97,43	80	80	100	100	92,54

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	96,31	96,31	80	80	100	100	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan; Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	12 orang	9 orang	10 Orang	10 Orang	100	100	68,18
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Tahun)	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100	100	99,66
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan; Jumlah komponen Instalasi listrik yang disediakan	1 Paket 1 Unit	1 Paket 1 Unit	1 Paket 1 Unit	1 Paket 1 Unit	100	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	99,09
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan; Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat; Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	1 Paket 12 Bulan	100	100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	100	99,99
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Paket	100	100	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung dan bangunan yang dibangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Paket	100	100	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	7 Laporan	100	100	99,02

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Jumlah Surat yang diadministrasikan	1 Laporan 1 Tahun	1 Laporan 1 Tahun	1 Laporan 1 Tahun	1 Laporan 1 Tahun	100	100	94,86
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	100	96,02
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	100	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	100	99,95
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	100	99,57
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	9 unit	10 Unit	10 Unit	100	100	98,69
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di rehab	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat dan Mesin yang diperbaiki		1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	100	100
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	25.000 Ha	3.762 Ha	25 Ha	25 Ha	100	100	95,45
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	100	93,64
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/ Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100	82,78
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusa	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola; Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan	-	-	250 Ha	-	-	-	-

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi; Luas wilayah perairan, pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang direhabilitasi	-	-	3 Ha	3 Ha	100	100	98,72
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1000 Rekomendasi	1000 Rekomendasi	1000 Rekomendasi	1000 Rekomendasi	100	100	99,75
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1000 Rekomendasi	1000 Rekomendasi	1000 Rekomendasi	1000 Rekomendasi	100	100	99,75
	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1000 Rekomendasi	1000 Rekomendasi	1000 Rekomendasi	-	-	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	100	99,12

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	100	99,12
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	433.032,24	449.571,7	446.023,20	482.343,21	100	100	99,41
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	100	99,00
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	100	98,50
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok nelayan yang di bina dan terfasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	100	99,82
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	100	99,93

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Daerah Provinsi								
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok nelayan yang di bina dan terfasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	100	99,93
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100	99,65
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	1 GT	1 GT	1 GT	1 Dokumen	100	100	100
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100	100	99,65
	Penentuan Lokasi Pembangunan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	1 Perikanan	1 Perikanan	1 Perikanan	1 Perikanan	100	100	100

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Pelabuhan Perikanan								
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1 Perikanan	1 Perikanan	1 Perikanan	1 Perikanan	100	100	99,17
	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana; Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan yang Operasional (PPI)	1 PPI	1 PPI	1 PPI	1 PPI	100	100	99,78
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan	201.669	217.945,5	209.219,00	218.998	100	100	98,78
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	100	100	98,64

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	100	100	98,67
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	100	100	98,62
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100	100	98,82
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut (Unit) Jumlah Prasarana Operasional Unit Budidaya; Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Laut yang disediakan; Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Laut yang disediakan	1 Unit 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Unit 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Unit 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Unit 1 Kegiatan 1 Kegiatan	100	100	98,22

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/ atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar yg disediakan; Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar	4 Pokdakan	4 Pokdakan	4 Pokdakan	4 Pokdakan	100	100	98,97
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut; Jumlah Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya; Jumlah Prasarana Operasional Unit Budidaya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	100	99,67
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat; Jumlah Sampel Produk Perikanan Budidaya yang diuji minimal 96% bebas residu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100	99,75
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Pembudidaya; Jumlah Unit Pembudidaya yang mendapat Pembinaan CPIB dan CBIB; Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang	25 UPR, 25 Unit, 1 Dokumen	25 UPR, 25 Unit, 1 Dokumen	25 UPR, 25 Unit, 1 Dokumen	25 UPR, 25 Unit, 1 Dokumen	100	100	99,11

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Provinsi	Pembudidayaan Ikan; Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan							
	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Pembudidayaan yang mendapatkan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan	5 UPR	5 UPR	5 UPR	5 UPR	100	100	98,57
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	100	99,51
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	100	99,44
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil;	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	100	99,30

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan yang Ditangani							
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil; Jumlah Hari Operasional Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan di Perairan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen 10 Hari Operasi	1 Dokumen 10 Hari Operasi	100	100	99,87
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Pokmaswas yang di bina	40 Kelompok	40 Kelompok	41 Kelompok	41 Kelompok	100	100	97,99
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas	100	99,34	50	50	100	100	99,78

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100	99,80
	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Hari Operasional Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Perairan Umum Daratan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	100	100	99,69
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang	Angka Konsumsi Ikan 46,91 Kg/Kap/Tahun	Angka Konsumsi Ikan 49,15 Kg/Kap/Tahun	Angka Konsumsi Ikan 48,34	Angka Konsumsi Ikan 51,32 Kg/ Kap/	100	100	96,78

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		dipasarkan (Jenis)			Kg/Kap/Tahun	Tahun			
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100	100	94,23
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100	100	94,23
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	100	97,29

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko; Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan SKP	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha, 5 sertifikat	5 Unit Usaha, 5 sertifikat	100	100	95,64
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan,	33 Unit Usaha, 1 Kegiatan	33 Unit Usaha, 1 Kegiatan	33 Unit Usaha, 1 Kegiatan	33 Unit Usaha, 1 Kegiatan	100	100	99,07

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		dan Berdaya Saing; Jumlah Pendampingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan							
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	100	-
	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lokasi Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi	100	100	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Insentif yang diberikan pada pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100		-

Program Kegiatan yang mendukung Pembangunan Gender pada Tahun 2023 dapat di lihat pada Tabel 2.2 yaitu :

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Kegiatan	Satuan	Volume	Pagu (Rp.)	Dukungan Langsung/ Tidak Langsung	Realisasi	
									Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya kegiatan olahraga yang responsif gender	Orang, kegiatan	153 orang, 12 kegiatan	53.850.000	Langsung	53.850.000	100
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Bimtek Pembentukan dan Peningkatan Kelembagaan bagi Masyarakat di Perairan Umum Daerah	Orang	55 orang	2.014.556.980	Langsung	1.984.368.000	98,50
3.		Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Bantuan Premi Asuransi Nelayan	Orang	6.000 orang	1.200.000.000	Langsung	1.200.000.000	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sesuai penjabaran visi, misi, sasaran, dan program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024 yaitu **“Sumatera Utara yang Maju Aman dan Bermartabat”** dan dijabarkan dalam 5 (lima) misi, yaitu :

Misi 1 : Bermartabat dalam kehidupan.

Misi 2 : Bermartabat dalam berpolitik.

Misi 3 : Bermartabat dalam pendidikan.

Misi 4 : Bermartabat dalam pergaulan.

Misi 5 : Bermartabat dalam lingkungan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sesuai penjabaran visi, misi, sasaran, dan program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Secara umum, tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah Provinsi. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2023**

NO	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Tahun 2023	Capaian Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022		
1	2	3	4	6	7	8	9	10		11
1.	a. Produksi Perikanan (Ton)			634.701,24	655.242,20	676.399,89	647.654,92	667.517,20	701.341,21	Melebihi Target
	- Produksi Perikanan Tangkap (Ton)			433.032,24	446.023,20	459.403,89	439.657,60	449.571,7	482.343,21	Melebihi Target
	- Produksi Perikanan Budidaya (Ton)			201.669	209.219	216.996,00	227.235,27	217.945,5	218.998	Melebihi Target
	b. Tingkat Konsumsi Ikan (Persen)			46,91	48,34	49,79	47,84	49,15	51,32	Melebihi Target
	c. Nilai Tukar Nelayan (Persen)			102	103	109	104,28	107	108,36	Berkurang
	d. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (Persen)			103	104	105	103,7	105,2	97,30	Berkurang
	e. Kawasan Konservasi Perairan (Hektar)			25.000	25.000	25.000	-	3.762,07	166.167,92	Melebihi Target
	f. Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang (Hektar)			52.031	72.031	102.031	-	72.150	102.031	Sesuai Target
	g. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove			39	42	51	41	48	51	Sesuai Target

Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Sehubungan dengan hal di atas, pengumpulan data kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan. Perolehan data kinerja bersumber dari internal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang secara sistematis didasarkan pada laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari unit-unit pelaksana dilingkungannya dan dari eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara seperti Badan Pusat Statistik.

Pada akhir tahun data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikomunikasikan kembali kepada unit-unit pelaksana untuk memperoleh klarifikasi dan penyesuaian seperlunya. Kedua data tersebut selanjutnya diolah dan dirangkum untuk disajikan.

Cara Pengukuran Kinerja (isi hasil realisasi 2023)

Pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

2.3 Analisis Capaian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan bagian integral dari kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan. Pada tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Program Kegiatan. Seluruh Program dan Kegiatan pada tahun 2023 dilaksanakan dengan baik. Realisasi anggaran menurut program-program tersebut seperti terlihat pada Tabel 5 (terlampir). Adapun dapat kami jelaskan bahwa realisasi anggaran yang utama adalah kegiatan kepada masyarakat (khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan dan masyarakat pesisir yang tertuang pada lima program).

Table 5. Realisasi Anggaran Tahun 2023 menurut Program Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.990.962.970	29.189.728.958	97,33
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	947.036.764	903.916.400	95,45
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7.678.128.900	7.632.679.374	99,41
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.721.799.286	6.639.928.811	98,78
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1.626.481.976	1.618.559.309	99,51
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	950.044.140	919.452.104	96,78
	TOTAL	47.914.454.036	46.904.264.956	97,89

Jumlah anggaran dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mencapai sasaran strategis pada tahun 2023 dipandang cukup efektif dengan memberikan hasil yang baik. Hal ini diharapkan memberikan dampak yang positif bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk terus saling bekerja sama dan saling mendukung dalam kemajuan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sumatera Utara pada tahun-tahun mendatang.

2.4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan urusannya, maka arah pembangunan kelautan dan perikanan Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Arah pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 mengacu kepada pelaksanaan tahun kedua Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara serta RPJMD Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2024-2026. Rencana pembangunan kelautan dan perikanan pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024–2026 ditujukan dalam rangka memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada peningkatan daya saing, ketahanan pangan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.
2. Tantangan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2024– 2026 antara lain adalah :
 - A. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil
 1. Keterbatasan sarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mengakomodir luas wilayah perairan laut di WPP 571 Selat Malaka yang hanya memiliki 2 unit speed boat pengawas dan 1 unit kapal pengawas serta WPP 572

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

Samudera Hindia tidak memiliki kapal pengawas, untuk itu perlu dibentuk satuan kerja pengawasan di beberapa daerah Kabupaten/Kota beserta kelengkapan sarana dan prasarana dan Sumber Daya Manusianya;

2. Masih terjadinya pelanggaran yang dilakukan nelayan modern terkait jalur penangkapan dan alat penangkap ikan serta masih banyaknya kapal perikanan yang tidak memiliki izin dan atau masih adanya kapal yang tidak sesuai dengan dokumen perizinannya dan tidak sesuai dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 18 tahun 2021, untuk itu perlu diperbanyak jumlah hari dalam melakukan patroli di laut;
3. Masih terjadi konflik antar nelayan dalam memperebukan daerah penangkapan ikan untuk alat tangkap yang berbeda di wilayah 0-4 Mil, hal ini diakibatkan kurangnya pengetahuan para nelayan tentang peraturan tentang perikanan untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan;

B. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Adapun isu strategis dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antara lain :

1. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan merupakan isu yang sangat penting. Sebagai salah satu Pelabuhan Perikanan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam Strategi pengembangan kelautan dan perikanan yaitu Pembangunan Ekonomi Biru (Blue Economy). Hal ini sesuai dengan sesuai dengan KEPMEN KP RI Nomor 187 Tahun 2023 dimana Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan merupakan Pelabuhan Pangkalan Pada Zona Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan

Pelabuhan Pangkalan Yang Telah Memenuhi Persyaratan dalam Penarikan Pasca Produksi di zona 5 WPPNRI 571.

Namun Kondisi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan tanjung balai asahan saat ini masih jauh tertinggal dari pelabuhan perikanan lainnya yang ada di Sumatera Utara. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat bahwa pelabuhan perikanan tanjung balai asahan adalah salah satu pelabuhan perikanan di Pantai Timur milik Provinsi Sumatera Utara yang seharusnya menjadi tempat utama bagi para nelayan dan pekerja terkait perikanan melakukan aktivitas perikanan. Seperti kita ketahui sektor perikanan merupakan sektor yang memiliki potensi yang besar dan apabila dikelola dengan inovatif dan baik dapat memberikan manfaat dan membantu perekonomian Sumatera Utara khususnya Tanjung Balai Asahan yang merupakan penghasil ikan terbesar di Sumatera Utara. Untuk itu diharapkan peran nyata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan dan menjalankan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Salah satunya dengan mendukung Pembangunan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan, dimana akan terjadi kegiatan ekonomi yang membawa dampak bagi pemerintah provinsi sumatera utara sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan tanjung balai asahan yang mayoritas penduduk nya bermatapencaharian sebagai nelayan.

Maka oleh karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi kepelabuhanan dan fungsi perusahaan sesuai dengan PP 27 Tahun 2021 Pasal 184 dalam mendukung PIT dimana pelabuhan perikanan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah sumatera utara khususnya pantai timur sumatera utara, maka sangat diperlukan Pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan di pelabuhan perikanan tanjung balai asahan. Adapun pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan yang harus ada

pada Pelabuhan Perikanan sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2021 memiliki fasilitas berupa Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional, dan Fasilitas Penunjang. Dimana saat ini Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai hanya memiliki fasilitas yang paling minimal untuk sebuah pelabuhan perikanan sehingga sampai saat berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional pelabuhan perikanan tanjung balai asahan masih termasuk Pelabuhan Kelas D. Dan berdasarkan data statistik tahun 2023 Jumlah Kapal di Tanjung Balai dan Asahan sebanyak 4.343 Kapal, dengan Jumlah Nelayan sebanyak 7.963 Orang. Hal ini merupakan suatu potensi yang sangat besar jika kegiatan perikanan, tambat labuh dan bongkar muat di lakukan di Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan. Oleh karena itu, untuk memberikan dampak positif terhadap kelangsungan ekonomi masyarakat terutama dalam bentuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat disekitar tanjung balai asahan, Pelabuhan perikanan tanjung balai harus meningkatkan Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang agar menjadi Pelabuhan Kelas C. Sehingga kegiatan perikanan dapat terkelola dengan baik yang dapat mencegah, menghalangi dan memberantas penangkapan ikan secara illegal dan tidak dilaporkan. Adapun Pengembangan Fasilitas berkelanjutan yang direncanakan dengan total anggaran Rp 38.000.000.000,- sebagai berikut:

a) Fasilitas Pokok.

1) Perpanjangan Dermaga.

Dimana untuk kondisi saat ini, dermaga existing di pelabuhan perikanan tanjung balai asahan hanya sepanjang 60 Meter dan sudah mengalami penurunan fungsinya sebesar 40% dan dapat berisiko ambruk/rubuh jika tidak segera dilakukan perbaikan. Oleh karena itu, perbaikan dermaga diharapkan segera dapat

dilakukan agar menghindari terjadinya risiko ketika nelayan melakukan aktifitas perikanan di dermaga pelabuhan tersebut. Selain perbaikan, Perpanjangan dermaga sepanjang 500 meter yang direncanakan dibangun secara bertahap dan berkelanjutan. Dimana pada tahapan pertama perpanjangan dermaga direncanakan sepanjang 250 Meter. Perpanjangan dermaga ini menjadi prioritas karena merupakan salah satu kriteria teknis dalam peningkatan kelas pelabuhan perikanan. Serta dengan melihat potensi yang ada, jika dikelola dan terpusat di pelabuhan perikanan tanjung balai asahan dapat memberikan dampak dan implikasi terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2) Kolam pelabuhan.

Untuk mendapatkan fungsi yang optimal dan ideal kedalaman kolam dan luas kolam pelabuhan juga menjadi perhatian utama, karena Luas kolam pelabuhan sangat di pengaruhi oleh jumlah dan ukuran kapal yang akan berlabuh. Untuk mendukung peningkatan kelas pelabuhan, maka kedalaman kolam pelabuhan paling dangkal Minus 2 Meter.

Adapun Luas kolam Pelabuhan di UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan seluas 2.250 m².

3) Jalan Lingkungan Pelabuhan.

Pengembangan Jalan lingkungan Pelabuhan perikanan tanjung balai asahan harus dilakukan agar memperlancar jalannya aktivitas operasional pelabuhan dengan minimal lebar jalan 8 Meter. Kondisi jalan lingkungan juga harus dengan kondisi yang baik, bersih, nyaman dan memiliki ruang terbuka hijau agar dapat mewujudkan pelabuhan berwawasan lingkungan yang sejalan dengan konsep ekonomi biru.

Kondisi Jalan Pelabuhan di UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan saat ini adalah seluas 90x8 m2.

b) Fasilitas Fungsional.

1) Bengkel perikanan modern

Pengembangan bengkel perikanan yang modern dan berteknologi terkini merupakan fasilitas fungsional yang harus dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan sehingga mampu menghasilkan pelayanan perbengkelan yang bermutu, produktivitas tinggi dan efisien.

2) Pabrik es dan Cold Storage tenaga surya

Perluasan Pemanfaatan Energi Alternatif Untuk Kegiatan Perikanan sangat diperlukan, salah satunya pemanfaatan energi tenaga surya. Wilayah Indonesia yang berada di garis equator memberikan keuntungan antara lain intensitas penyinaran cahaya matahari yang berpotensi membangkitkan energi Listrik. Sehingga pengembangan pabrik es dan cold storage bertenaga surya mendukung ketahanan energi, Penghematan pengeluaran biaya dan menuju ekonomi masyarakat mandiri dan ramah lingkungan dan berkelanjutan khususnya Masyarakat nelayan.

3) Air Bersih dan Sanitasi Modern

Pengembangan pelabuhan perikanan tanjung balai asahan juga harus memperhatikan dampak lingkungan hidup. Masalah pencemaran lingkungan di pelabuhan dapat terjadi karena keterbatasan fasilitas kebersihan, sedikitnya peraturan dan rendahnya kesadaran dan kepedulian pengguna pelabuhan terhadap kebersihan lingkungan. Untuk itu perlunya pengembangan fasilitas air bersih dan

sanitasi modern untuk menjaga higienitas dan kebersihan lingkungan pelabuhan perikanan.

c) Pembangunan Fasilitas Penunjang

- Fasilitas sosial dan umum berupa klinik kesehatan.

Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pengembangan klinik kesehatan di pelabuhan perikanan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada nelayan yang termasuk dalam kategori pekerjaan dengan risiko tingkat tinggi ketika melaut. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang lengkap di pelabuhan, dan apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat nelayan melaut, nelayan tersebut bisa segera mendapatkan penanganan yang cepat, sehingga meminimalisir resiko terjadinya kondisi yang lebih fatal.

Dermaga yang ada saat ini masih seluas 60x6 m². Dengan Panjang dermaga ± 78 meter. Kondisi dermaga saat ini masih dapat digunakan, namun sudah mengalami penurunan fungsi sebesar 40%. Sehingga Aktivitas bongkar muat kapal-kapal ikan hanya dilakukan oleh Kapal Ikan dibawah 30 GT, sedangkan kapal-kapal diatas 30 GT melakukan aktivitas bongkar muat ditangkahan/ Gudang yang ada disekitar Tanjung Balai Asahan.

Berdasarkan surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 164-TIB/2000, lokasi Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada awalnya dengan luas areal ± 34.100 m². Namun Berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 3 Tahun 2013 dari Badan Pertanahan Nasional telah ditetapkan bahwa luas untuk dan atas nama Pemkab Asahan cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara seluas 10.787 m³. Dengan terbitnya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Matrix Y Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan, Sub Urusan Perikanan Tangkap - Penetapan lokasi pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi adalah wewenang Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan koordinasi secara administratif dengan Pemkab Asahan dalam hal pelepasan tanah lokasi PPI Tersebut. Sampai dengan tahun 2023 telah banyak dilakukan pembangunan sarana dan prasarana di lokasi PPI tersebut yang tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mendukung program Penangkapan Ikan Terukur dan Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Pasca Produksi.

Pengembangan Pelabuhan ini sangat penting untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap, Meningkatkan Nilai Konsumsi Ikan untuk penurunan angka stunting serta Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan di Sumatera Utara. Karena Nelayan merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap segala jenis situasi kemiskinan. Penghidupan keluarga nelayan rentan terhadap ketidakpastian dan sering dicirikan sebagai penduduk dalam sektor miskin dalam masyarakat. Beberapa faktor yang merupakan sumber kerentanan nelayan diantaranya adalah sumberdaya yang terbatas, keterbatasan teknologi penangkapan, perubahan iklim, persaingan harga ikan minimnya faktor permodalan dan faktor sosial ekonomi. Dengan teknologi yang terbatas, maka ketergantungan terhadap musim menjadi sangat tinggi, dan wilayah tangkapnya juga terbatas. Akibatnya hasil tangkapan juga terbatas. Ketidakpastian mata pencaharian maupun perubahan pendapatan yang dihadapi nelayan menyebabkan keluarga nelayan merasakan tekanan ekonomi. Kerentanan

sosial ekonomi keluarga nelayan yang tinggi terlihat dari besarnya beban yang dimiliki, dan hal tersebut berdampak terhadap menurunnya kesejahteraan nelayan. Padahal seperti kita ketahui Sektor perikanan mempunyai peran dalam menunjang perkembangan perekonomian nasional. Namun masih belum berdampak signifikan terhadap kehidupan nelayan. Oleh karena itu dengan adanya pengembangan pelabuhan perikanan di provinsi Sumatera utara sangat diharapkan dapat memberikan dampak kepada Masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja, menaikkan taraf hidup nelayan agar mampu bersaing, mampu memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan aktivitas perikanan, mendapatkan kemudahan akses permodalan dalam meningkatkan usaha perikanan sehingga meningkatkan pendapatan Masyarakat Nelayan Sumatera utara.

Selain itu, dalam pengembangan pelabuhan perikanan juga harus memperhatikan dampak lingkungan hidup bagi masyarakat disekitar pelabuhan perikanan. Dengan tingginya aktivitas perikanan yang terjadi dipelabuhan perikanan tentunya pencemaran lingkungan bisa terjadi apabila penanganan terhadap kebersihan lingkungan pelabuhan perikanan tidak dilaksanakan dengan baik. Pengembangan Penerapan sanitasi lingkungan di pelabuhan perikanan salah satu yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang higienis dan bersih sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Selain itu untuk menciptakan lingkungan yang bersih, melaksanakan program kerja bersama pengguna pelabuhan, penerapan peraturan dengan sanksi yang tegas, pengawasan ketat terhadap lingkungan pelabuhan, sosialisasi kepada pengguna pelabuhan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian pengguna pelabuhan perikanan dalam menjaga kebersihan lingkungan pelabuhan perikanan.

Pelabuhan perikanan yang memiliki fasilitas pokok, fasilitas

fungsional, dan fasilitas penunjang yang memadai tentunya berdampak terhadap perputaran roda ekonomi sektor perikanan di wilayah provinsi sumatera utara khususnya kepada nelayan dan masyarakat sekitar pelabuhan tanjung balai asahan. Sehingga ketika masyarakat mendapatkan pelayanan jasa yang disediakan pelabuhan perikanan, Pemerintah Provinsi bisa menjalankan retribusi/ pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan diberikan oleh Pelabuhan Perikanan. Dan hal ini dipastikan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Retribusi Jasa Kepelabuhan secara signifikan dan berkelanjutan.

Produksi di UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan terdiri dari Hasil tangkapan ikan dan kerang. Hasil tangkapan Kerang pada tahun 2022 sebesar 240.000 Kg. Sedangkan hasil Tangkapan Ikan Tahun 2022 UPT Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan berdasarkan (STBLKK/SLO/SPB) sebesar 22.463.760 Kg. Dengan rincian sebagai berikut:

HASIL TANGKAPAN TAHUN 2022 RP TANJUNG BALAI ASAHAN (STBLKK/SLO/SPB)/SPB)

NO.	JENIS TANGKAPAN	JUMLAH (kg)												TOTAL (kg)
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Bawal	3.300	1.990	2.050	750	2.210	1.990	5.720	3.100	2.080	2.340	4.900	5.034	35.464
2	Beloso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Cencaru	134.213	68.877	54.931	80.820	99.687	90.508	85.220	87.254	98.492	118.194	107.260	57.920	1.083.376
4	Ciliap	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	400
5	Cucut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Cumi-Cumi	104.154	94.886	84.269	97.139	91.059	121.365	144.952	143.378	153.819	174.710	171.294	138.560	1.519.575
7	Gulamah	90.049	90.440	88.260	83.220	85.210	108.640	114.960	108.170	108.680	144.680	96.120	99.120	1.217.549
8	Ikan Asin	-	-	-	-	25.935	12.210	2.878	23.622	3.807	24.365	-	-	92.817
9	Ikan Campur	74.643	314.994	124.486	121.870	208.736	164.940	125.220	161.150	170.240	130.300	3.116	77.700	1.677.395
10	Ikan Talang	2.030	42.500	431	2.400	21.110	4.346	-	16.403	-	11.000	15.700	3.223	119.143
11	Jenaha	7.170	6.840	6.800	9.410	7.750	7.620	11.830	5.510	4.070	6.580	5.926	7.770	87.276
12	Kakap	-	-	-	200	150	1.800	450	850	750	700	900	2.220	8.020
13	Kecepeh	87.680	48.700	79.190	77.950	60.500	56.710	63.650	54.900	58.900	66.350	60.300	56.050	770.880
14	Kembung	106.373	115.754	114.761	161.722	98.146	157.446	130.493	137.255	179.754	143.633	143.389	80.619	1.569.345
15	Kerapu	-	-	-	-	150	-	-	-	-	5.000	405	800	6.355
16	Kotip-Kotip	-	-	15.000	-	7.100	500	50	-	-	-	-	-	22.650
17	Layang	101.888	987.555	251.923	518.968	646.462	896.912	589.326	1.109.303	836.280	940.845	189.160	186.360	7.254.983
18	Layur	5.642	5.367	5.525	2.773	4.916	2.630	4.662	-	9.750	5.275	4.789	5.810	57.139
19	Malong	6.180	5.650	5.321	14.270	12.970	15.800	21.302	16.940	-	13.520	13.300	11.565	136.818
20	Mayung	-	-	-	7.849	600	-	-	-	-	-	-	-	8.449
21	Moa	4.789	4.811	1.236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.836
22	Pari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
23	Pekco	-	-	-	-	130	130	-	200	300	150	-	940	1.850
24	Pertakus	-	2.300	3.340	240	300	2.100	200	400	300	3.896	900	6.620	20.596
25	Puput	181	300	3.220	450	330	549	-	-	650	-	-	1.711	7.391
26	Rajungan	-	-	588	-	-	-	-	-	900	1.100	3.899	2.120	8.607
27	Sekpo	63.490	72.535	71.490	87.190	82.810	73.380	90.580	94.460	92.020	83.350	78.760	68.720	958.785
28	Selar	139.072	107.938	81.565	21.694	145.172	58.126	37.500	115.737	60.700	66.755	49.496	45.268	929.023
29	Senangin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
30	Senohong	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	300
31	Sotong	17.100	20.550	22.400	-	21.600	-	-	-	-	-	-	-	81.650
32	Tembang	23.017	69.399	16.511	60.205	93.042	74.449	48.338	72.155	48.879	57.562	25.484	29.475	618.516
33	Tenggiri	410	400	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	1.110
34	Teri	44.563	62.029	60.109	97.050	60.305	72.260	97.100	79.610	85.730	89.740	76.260	74.180	898.936
35	Terisi	3.657	2.716	4.347	1.568	2.440	3.936	2.418	2.129	4.326	2.901	3.185	3.366	36.989
36	Tongkol	48.806	256.292	81.049	163.546	260.033	212.732	143.247	169.150	132.203	164.606	85.646	77.725	1.795.035
37	Udang	107.850	125.955	154.095	38.830	197.795	102.220	125.760	114.440	131.519	115.860	110.900	101.278	1.426.502
TOTAL (kg)		1.176.257	2.508.778	1.332.897	1.650.514	2.236.948	2.243.589	1.845.856	2.516.116	2.184.149	2.373.413	1.251.089	1.144.154	22.463.760

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

3. Penangkapan Ikan.

1. Kapal ikan menangkap ikan tanpa dokumen yang sah, seperti;
 - a. Tanpa IUP/SIPI, atau telah habis masa berlakunya,
 - b. Surat ijin tidak sesuai dengan kondisi kapal yang sebenarnya, seperti: penangkapan ikan dengan alat terlarang dan Pelanggaran jalur penangkapan ikan
2. Terjadinya pencemaran di perairan umum dan pantai;
3. Terjadi kesenjangan pemanfaatan SDI di perairan Sumatera Utara antara pantai barat dan pantai timur;
4. Meningkatnya biaya operasional untuk melakukan penangkapan ikan yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM dan oli;
5. Jumlah kapal perikanan tangkap masih didominasi perahu kecil ukuran <5GT dan alat tangkap tradisional dengan produksi yang masih rendah;
6. Produksi perikanan masih didominasi oleh hasil tangkapan di laut;
7. Daerah penangkapan ikan (fishing ground) yang terbatas;
8. Penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang penangkapan ikan masih terbatas;
9. Rendahnya mutu hasil tangkapan ikan nelayan yang berakibat kepada rendahnya harga jual ikan;
10. Terbatasnya bahan baku kayu sebagai bahan pembuatan kapal perikanan.

c. Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan.

1. Penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang belum memperhatikan standar kesehatan;
2. Akses permodalan bagi usaha bidang kelautan dan perikanan masih terbatas;
3. Tingkat pendidikan dan keterampilan pengolah dan pemasar hasil perikanan masih rendah;
4. Belum semua parameter uji untuk pengujian produk hasil perikanan terakreditasi;

5. Jenis peralatan uji di PMHP belum lengkap;
6. Belum optimalnya diversifikasi produk ekspor hasil perikanan Sumatera Utara;
7. Ketersediaan bahan baku untuk UPI yang melakukan kegiatan ekspor hasil perikanan masih terbatas;
8. Belum semua UPI dan supplier memiliki Seritifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
9. Mutu hasil perikanan yang di ekspor oleh UPI belum sesuai dengan permintaan pembeli luar negeri;
10. Pengelolaan usaha penangkapan ikan oleh sebagian besar pelaku usaha belum dilandasi dengan kaidah-kaidah pengelolaan usaha yang baik;

d. Budidaya Perikanan.

1. Meningkatnya harga pakan sehingga meningkatkan biaya produksi;
 2. Belum tuntasnya penanganan penyakit ikan, khususnya pada pembudidayaan udang;
 3. Belum optimalnya penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB); Terbatasnya akses permodalan;
 4. Penyakit ikan dan udang.
 5. dapat diidentifikasi sebagai berikut:
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara.
- a. Meningkatnya produksi perikanan baik perikanan tangkap dan budidaya di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan khususnya nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah dan pedagang hasil perikanan di Sumatera Utara
 - b. Meningkatnya ekspor hasil perikanan di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka peningkatan devisa

- c. Meningkatnya konsumsi ikan di Provinsi Sumatera Utara
 - d. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara
4. Peluang dan tantangan pelayanan OPD Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
- a. Pemberdayaan Ekonomi masyarakat pesisir
 - Menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
 - Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir
 - b. Pengembangan pesisir dan pulau-pulau terluar.
 - Meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan, pengolah dan pedagang hasil perikanan serta pembudidaya ikan tradisional di kawasan pesisir
 - Meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan.
 - Memelihara kelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan beserta ekosistemnya.
 - c. Pengembangan usaha hasil perikanan.
 - Mengembangkan usaha hasil perikanan yang mampu menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, nilai tambah bagi masyarakat nelayan khususnya di pedesaan, mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
 - Diversifikasi hasil olahan perikanan
 - Peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan
 - Penerapan rantai dingin.
 - d. Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat.
 - Terwujudnya peningkatan investasi dan peluang usaha bidang Kelautan dan Perikanan

- Menjadikan laut sebagai perekat kesatuan dan persatuan NKRI.
- e. Pengembangan budidaya perikanan
 - Meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan
 - Menyediakan induk dan benih unggul
 - Pencegahan hama penyakit dan ikan
 - Restocking perairan umum
 - Pembangunan /perbaikan dempon
 - Pembangunan/perbaikan saluran irigasi
- f. Pengembangan perikanan tangkap
 - Meningkatkan pendapatan nelayan
 - Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan
 - Pembangunan /rehabilitasi Pelabuhan perikanan
 - Pembangunan /rehabilitasi Pangkalan pendaratan Ikan
 - Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana penangkapan ikan lainnya
 - Pemberdayaan nelayan skala kecil
- g. Pengembangan perikanan, kelautan, masyarakat pesisir sebagai berikut :
 - Meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - Meningkatkan nilai rill sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perikanan dan peningkatan peranan produk dan jasa maritim dan kelautan.
 - Meningkatkan pemantapan status kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - Meningkatkan peningkatan pengelolaan berbasis masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan konservasi habitat pesisir, laut dan perairan umum.
 - Terwujudnya peningkatan investasi dan peluang usaha bidang Kelautan dan Perikanan.
 - Meningkatkan pengendalian sumberdaya perikanan

5. Formulasi Isu-isu penting.

- a. Pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara tahun 2023.

Selama tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan kelautan perikanan daerah dengan capaian kinerja yaitu :

1. Produksi hasil perikanan tangkap pada tahun 2023 sebesar 482.343,21 ton.
2. Produksi hasil budidaya perikanan pada tahun 2023 sebesar 218.998 ton.
3. Konsumsi ikan masyarakat Sumatera Utara pada tahun 2023 sebesar 51,32 kg/kap/thn.

2.5. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2025, beberapa usulan yang diajukan dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan.

Analisis kebutuhan kemudian dilakukan terhadap estimasi volume kegiatan dan dana yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan diperlukan sebagai langkah antisipasi agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat terakomodir seluruhnya baik jumlah program/kegiatan/sub kegiatan, volume, maupun dana yang dibutuhkan.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				61.546.594.832,-					61.546.594.832,-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100%	30.573.082.120,-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase pemenuhan layanan administrasi	100%	30.573.082.120,-	
Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	16 Dokumen	2.100.000.000,-	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	2.100.000.000,-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Medan	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun	8 Dokumen	1.000.000.000,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangka Daerah	Medan	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun	8 Dokumen	1.000.000.000,-	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Medan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Yang Disusun	4 dokumen	800.000.000,-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Medan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Yang Disusun	4 dokumen	800.000.000,-	

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Provsu	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Yang Disusun	4 dokumen	100.000.000,-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Provsu	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Yang Disusun	4 dokumen	100.000.000,-	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provsu	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	200.000.000,-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provsu	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	200.000.000,-	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas KP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109 org/bln	18.384.894.866,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas KP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109 org/bln	18.384.894.866,-	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas KP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	250.000.000,-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas KP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	250.000.000,-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas KP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	1 Laporan	100.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas KP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	1 Laporan	100.000.000,-	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		Semesteran SKPD					Semesteran SKPD			
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Provsu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	200.000.000,-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Provsu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	200.000.000,-	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provsu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	100.000.000,-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provsu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	100.000.000,-	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Provsu	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit	150.000.000,-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Provsu	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit	150.000.000,-	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas KP	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	109 Stel	300.000.000,-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas KP	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	109 Stel	300.000.000,-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas KP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Org	250.000.000,-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas KP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Org	250.000.000,-	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dinas KP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dinas KP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,-	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas KP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas KP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas KP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	325.000.000,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas KP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	325.000.000,-	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas KP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	155.000.000,-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas KP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	155.000.000,-	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas KP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	150.000.000,-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas KP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	150.000.000,-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	400.000.000,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	400.000.000,-	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas KP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	115.000.000,-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas KP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	115.000.000,-	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provusu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	600.000.000,-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provusu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	600.000.000,-	

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Pengadaan Mebel	Dinas KP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	143.187.254,-	Pengadaan Mebel	Dinas KP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	143.187.254,-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provsu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	500.000.000,-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provsu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	500.000.000,-	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provsu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	80.000.000,-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provsu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	80.000.000,-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provsu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	550.000.000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provsu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	550.000.000,-	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000,-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000,-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.650.000.000,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas KP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.650.000.000,-	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas KP	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak	10 Unit	350.000.000,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas KP	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak	10 Unit	350.000.000,-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provsu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	210.000.000,-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provsu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	210.000.000,-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas KP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas KP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000,-	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10000 Ha	3.236.666.712,-	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10000 Ha	3.236.666.712,-	

RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	44000 Ha	1.000.000.000,-	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	44000 Ha	1.000.000.000,-	
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	50 Ha	1.550.000.000,-	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	50 Ha	1.550.000.000,-	
Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	1 Dokumen	250.000.000,-	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	1 Dokumen	250.000.000,-	
Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	150.000.000,-	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	150.000.000,-	

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	286.666.712	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	286.666.712	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Provusu	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	461.559,3 Ton	10.400.000.000,-	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Provusu	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	461.559,3 Ton	10.400.000.000,-	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	25 Unit	5.500.000.000,-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	25 Unit	5.500.000.000,-	
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	25 Unit	3.500.000.000,-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	25 Unit	3.500.000.000,-	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	25 Unit	1.400.000.000,-	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	25 Unit	1.400.000.000,-	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Provsu	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	229.260,8 Ton	4.200.000.000,-	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Provsu	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	229.260,8 Ton	4.200.000.000,-	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	100.000.000,-	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	100.000.000,-	
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	100.000.000,-	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	100.000.000,-	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembudidaya	50 Orang	1.000.000.000,-	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembudidaya	50 Orang	1.000.000.000,-	
Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	7 Unit	2.000.000.000,-	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	7 Unit	2.000.000.000,-	
Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	7 Unit	1.000.000.000,-	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	7 Unit	1.000.000.000,-	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN	Provsu	Persentase Sumber daya Kelautan dan Perikanan yang	98%	2.000.000.000,-	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN	Provsu	Persentase Sumber daya Kelautan dan Perikanan yang diawasi	98%	2.000.000.000,-	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
PERIKANAN		diawasi			PERIKANAN					
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha	250.000.000,-	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha	250.000.000,-	
Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha	750.000.000,-	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha	750.000.000,-	
Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	200.000.000,-	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	200.000.000,-	

RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	12 Kelompok Masyarakat	600.000.000,-	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	12 Kelompok Masyarakat	600.000.000,-	
Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha	100.000.000,-	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha	100.000.000,-	
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	100.000.000,-	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	100.000.000,-	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Provusu	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	98%	800.000.000,-	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Provusu	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	98%	800.000.000,-	
Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	40 Rekomenda si	100.000.000,-	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	40 Rekomenda si	100.000.000,-	
Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Dokumen	450.000.000,-	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Dokumen	450.000.000,-	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	10 Unit Usaha	250.000.000,-	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	10 Unit Usaha	250.000.000,-	
UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan										
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	225.000.000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	225.000.000,-	
Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha	1 Kegiatan	600.000.000,-	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha	1 Kegiatan	600.000.000,-	

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing			dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing			
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala	1 Kegiatan	400.000.000,-	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala	1 Kegiatan	400.000.000,-	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		usaha dan risiko					usaha dan risiko			
UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello										
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000,-	
Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	1 Unit	1.000.000.000,-	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	1 Unit	1.000.000.000,-	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	3.000.000.000,-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	3.000.000.000,-	
UPTD Budidaya Ikan Air Payau dan Laut										
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	258.000.000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	258.000.000,-	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Unit	1.403.650.000,-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Unit	1.403.650.000,-	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL /OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR HASIL/ OUTCOMES	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Kel/Desa					Kel/Desa				
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	855.196.000,-	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	855.196.000,-	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1.700.000.000,-	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1.700.000.000,-	

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Sebagaimana fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang utama yaitu penyelenggaraan perumusan kebijakan perikanan tangkap, budidaya, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkupnya, maka dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tentunya mengacu kepada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Usulan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai yaitu melalui proses Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Tingkat Provinsi serta penyesuaian dengan kondisi terkini kebutuhan saat perencanaan.

Namun, dari usulan-usulan aspirasi masyarakat melalui proses musrenbang, maka aspirasi tersebut diserap kedalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan skala prioritas yang juga disesuaikan dengan kemampuan atau besaran pagu indikatif yang ditetapkan oleh Tim Anggaran, sehingga pengusulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan akan menyesuaikan dengan anggaran dan usulan serta kebutuhan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan usulan dari para Pemangku Kepentingan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat di **Lampiran Tabel T-C.32**.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam konsep Rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2025-2029, agenda pembangunan Pengembangan Ekonomi Biru Indonesia terutama pada perikanan dan EBT berbasis kelautan sebagai sumber pertumbuhan baru dengan kerangka Regulasi Legalisasi Indonesia Blue Economy Roadmap sebagai turunan dari amanat RPJPN 2025-2045, Penguatan Regulasi IUU Fishing dan perikanan berbasis kuota dan Legalisasi pengklasifikasian Blue Taxonomy. Dalam Rancangan Awal RKP 2025, KKP masuk ke dalam 2 (dua) dari delapan Asta Cita yaitu:

Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, dengan 3 kelompok program kerja yaitu: a) swasembada pangan, b) ekonomi biru, dan c) sistem pertahanan dan keamanan Negara;

Asta Cita 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terutama pada kelompok program kerja: pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Konsep Blue Economy ini dikembangkan untuk mendorong peningkatan peran swasta dalam pembangunan ekonomi pro lingkungan melalui pengembangan bisnis dan investasi yang inovatif dan kreatif. Cara pandang ekonomi tersebut, merupakan cara untuk mengembangkan ekonomi yang mengandalkan sumber daya kelautan yang secara menyeluruh yang dikaitkan dengan manajemen kesinambungan dan pelestarian aset untuk menghasilkan lebih banyak

produk turunan dan produk lain terkait. Sedangkan esensi dari cara pandang ekonomi itu terletak pada inovasi dan kreativitas dalam berbisnis, termasuk di dalamnya diversifikasi produk, sistem produksi, pemanfaatan teknologi, financial engeneering, dan menciptakan pasar baru bagi produk-produk yang dihasilkan.

Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia mensinergikan konsep blue economy sebagai kerangka kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang tengah berjalan yakni industrialisasi kelautan dan perikanan. Didalam percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan dibutuhkan, modernisasi, peningkatan nilai tambah, dan daya saing. Blue Economy merupakan sebuah model ekonomi baru dengan menggunakan logic of ecosystem di dalam menjalankan pembangunan kelautan dan perikanan. Pada dasarnya, Blue Economy bukanlah ekonomi yang bersandarkan pada kelautan semata, akan tetapi dapat memberikan jaminan bahwa suatu pembangunan yang dijalankan tidak hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja sekaligus menjamin terjadinya keberlanjutan, terutama untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien dan tidak merusak lingkungan, namun mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Blue Economy menitikberatkan pada prinsip-prinsip pembangunan yang diarahkan untuk mencapai lima sasaran besar, yaitu efisiensi kekayaan alam (natural resources efficiency), tanpa limbah (zero waste), social inclusiveness, keseimbangan antara produksi dan dan konsumsi (Cyclic systems of production: endless generation to regeneration, balancing production and consumption), inovasi dan adaptasi (Open-ended innovation and adaptation).

Telaahan kebijakan pembangunan Nasional dan kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dengan Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yaitu: **“Akselerasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara”** dimana tema pembangunan tersebut **RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

akan menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan.. Berdasarkan tema pembangunan tersebut ditetapkan prioritas pembangunan Tahun 2025 sebagai berikut :

- 1). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- 2). Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif;
- 3). Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan;
- 4). Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Kebijakan pembangunan daerah merupakan kebijakan yang berkaitan dengan Program Kepala Daerah terpilih, sebagai arah bagi OPD maupun lintas OPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kebijakan pembangunan daerah disusun berdasarkan strategi Pembangunan Daerah Gubernur terpilih sesuai visi dan misinya juga mengacu pada agenda Pembangunan Nasional (RJPM Nasional) dan Provinsi Sumatera Utara (Dokumen Perencanaan Daerah Sumatera Utara). Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara dalam tahap penyusunan Tahun 2025 yang disesuaikan dengan RKPD tahun 2025.

Pembangunan kelautan dan perikanan di Sumatera Utara pada tahun 2025 meliputi:

1. Peningkatan daya saing perikanan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah produk.
2. Pengembangan dan pengawasan sistem jaminan mutu produk hasil perikanan dan jaminan ketersediaan bahan baku industri.
3. Pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan.
4. Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan.

5. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.
6. Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan upaya adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan

3.2.1. Tujuan

Tujuan dalam Rencana Kerja ini diartikan sebagai sesuatu yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026. Tujuan jangka menengah Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan Pembudidaya Ikan.

Untuk menjabarkan dan mengimplementasikan yang akan dicapai dalam jangka waktu 3 tahun yaitu dari Tahun 2024-2026 maka yang menjadi tujuan lainnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir.
- b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan.
- c. Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat.
- d. Mendorong pertumbuhan industri dan ekspor hasil perikanan.
- e. Mendorong dan meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang produktif.
- f. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui konservasi dan rehabilitasi sumberdaya perikanan

3.2.2. Sasaran

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga tujuan dapat dijabarkan lebih dari satu sasaran. Sasaran dari Renja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan
2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, kebijakan yang ditetapkan sebagai pedoman dalam operasionalnya sesuai dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi Kelautan dan Perikanan dengan program yang berpihak kepada masyarakat pesisir dan nelayan pemberdayaan masyarakat pesisir.
2. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam rangka mengembangkan kesempatan berusaha, dan kesempatan kerja, peningkatan devisa melalui ekspor hasil perikanan dan peningkatan PAD.
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Pesisir dan laut serta Pulau-Pulau kecil.
4. Meningkatkan sistem pelayanan melalui pengembangan fasilitas (sarana/prasarana) dalam upaya mengoptimalkan produk kelautan.
5. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya perikanan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara maka Program Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya .
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1. Program Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

- Menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

3.3.2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- Meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan air payau dan laut
- Menyediakan induk dan benih unggul
- Pencegahan hama dan penyakit ikan
- Restocking perairan umum
- Pembangunan/ perbaikan dempon air payau dan laut
- Pembangunan/ perbaikan saluran irigasi

3.3.3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- Meningkatkan pendapatan nelayan
- Meningkatkan produksi perikanan di laut dan perairan umum
- Meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui asuransi nelayan yang diharapkan pada tahun 2024 akan mengcover 10 000 orang nelayan sehingga resiko kecelakaan nelayan saat melaksanakan usaha penangkapan semakin kecil.
- Penanganan konflik nelayan

3.3.4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- Meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan

- Diversifikasi hasil olahan perikanan
- Peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan
- Penerapan system rantai dingin

3.3.5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- Meningkatnya jumlah produksi perikanan
- Terwujudnya penegakan hukum di laut
- Terselenggaranya pengawasan sumberdaya laut
- Meningkatnya kesadaran nelayan dalam mematuhi aturan yang berlaku

3.3.6. Tabel Rencana Program Kegiatan Tahun 2025 dan Rencana Maju Tahun 2026

Renja tahun 2025 telah menyusun Tabel yang dilengkapi dengan kebutuhan anggaran tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 (terlampir).

3.4. Program Kerja NEMBUSH (Nelayan Membangun Sumatera Utara Hebat)

Nelayan adalah setiap orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan yang bekerja di perairan laut, sungai dan danau dengan menggunakan peralatan seperti jaring, pancing atau perahu nelayan. Peran Nelayan bagi perekonomian sangat signifikan, terutama dalam konteks negara-negara yang memiliki industri perikanan yang berkembang. Berikut adalah beberapa cara nelayan berkontribusi terhadap perekonomian antara lain :

1. Pendapatan dan Kesejahteraan

Nelayan menciptakan pendapatan bagi dirimereka sendiri dan keluarga mereka melalui penjualan hasil tangkapan mereka. Pendapatan ini mengalir kedalam ekonomi lokal, mendukung bisnis-bisnis lain seperti pengecer ikan, produsen peralatan nelayan,dan pasar lokal.

2. Penciptaan Lapangan Kerja

Industri perikanan menciptakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Selain nelayan sendiri, ada pekerjaan lain yang terkait dengan industri ini seperti pemrosesan ikan, distribusi, transportasi dan penjualan.

3. Ekspor dan Devisa

Negara-negara yang memiliki industri perikanan yang kuat dapat menghasilkan devisa yang signifikan melalui ekspor hasil tangkapan ikan.

4. Kontribusi terhadap PDB

Sektor perikanan, termasuk pekerjaan nelayan, berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Ini mencakup nilai dari tangkapan ikan, pemrosesan, pendistribusian, dan berbagai kegiatan terkait.

5. Pengembangan Daerah Pesisir

Industri perikanan pada daerah pesisir dapat menghasilkan investasi dan pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan perikanan.

6. Pemeliharaan Budaya dan Tradisi

Nelayan adalah penjaga tradisi dan budaya lokal terkait dengan kehidupandi laut atau sungai. Mereka mewariskan pengetahuan dan keterampilan mereka dari generasi ke generasi, yang memainkan peran penting dalam identitas budaya suatu daerah, khususnya pada daerah pantai timur dan pantai barat Provinsi Sumatera Utara.

Implementasi Program Nembush dipusatkan kepada Kampung Nelayan yang terdiri atas :

1. Kampung Nelayan Sejahtera

Suatu lingkungan pemukiman masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dengan mata pencarian penangkapan ikan diperairan laut atau perairan darat. Pemberdayaan Kampung Nelayan memiliki beberapa manfaat yang signifikan tidak hanya bagi para nelayan itu sendiri tetapi

juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa alasan pentingnya pemberdayaan kampung nelayan dilaksanakan antara lain :

- a. Pemberdayaan kampung nelayan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi bagi komunitas nelayan. Melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan usaha, dan dukungan teknis lainnya. Nelayan didorong untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan perikanan, agar meningkatkan pendapatan mereka.
- b. Pemberdayaan kampung nelayan juga dilakukan melalui pengembangan usaha usaha alternatif di luar perikanan, seperti agrowisata, kerajinan lokal, atau hilirisasi produk perikanan. Ini membantu mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan saja dan membuat komunitas lebih tangguh terhadap persaingan global.
- c. Program Nembush mencakup akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan seperti pembuatan pojok baca dan klinik kesehatan. Ini membantu meningkatkan kualitas hidup dan peluang masa depan bagi anggota komunitas nelayan serta generasi muda, dan memperkuat kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan social.
- d. Pemberdayaan kampung nelayan membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Melalui pelatihan dan pendidikan tentang praktik perikanan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam, nelayan dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga ekosistem laut dan lingkungan hidup di kawasan pesisir.
- e. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, pemberdayaan kampung nelayan bertujuan untuk memperkuat kapasitas komunitas

dalam mengelola sumber daya manusia dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

- f. Secara keseluruhan, pemberdayaan kampung nelayan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh bagi anggota komunitas nelayan, termasuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar, mengurangi kemiskinan, dan turut serta mempromosikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Untuk implementasi kegiatan di Bidang Perikanan Tangkap adalah:

1. Asuransi Nelayan
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
3. Sosialisasi tentang Peraturan Penangkapan dan Pelatihan atau Bimtek Teknik Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan
5. Peningkatan akses permodalan
6. Sertifikasi Sehat Nelayan

2. Kampung Perikanan Budidaya Sejahtera

Pemberdayaan Kampung Budidaya Perikanan juga sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi dan social di daerah. Berikut adalah beberapa alasan pentingnya kampung perikanan budidaya antara lain :

- a. Budidaya perikanan menjadi alternatif yang baik bagi nelayan tradisional yang bergantung pada penangkapan ikan di laut atau sungai.
- b. Budidaya perikanan meningkatkan ketersediaan pangan protein hewani bagi masyarakat.
- c. Pengembangan kampung perikanan budidaya menciptakan lapangan kerja local dan menggerakkan ekonomi di daerah.

d. Pemberdayaan kampung perikanan budidaya mempromosikan inovasi dan pengembangan teknologi baru dalam bidang budidaya perikanan.

e. Dengan mengembangkan budidaya perikanan yang berkelanjutan maka kampung perikanan budidaya meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi lokal.

Implementasi kegiatan bidang budidaya perikanan dan P2HP yaitu:

1. Pemberian bibit dan pakan ikan
2. Pemberian sarana dan prasarana pembudidayaan ikan seperti kolam bioflok, kolam terpal, mesin pembuat pakan, mesin pakan otomatis dan sarana pengangkutan
3. Pembangunan Cold Storage
4. Pembangunan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan
5. Pelatihan/ bimtek tentang CBIB, CPIB dan pengolahan hasil perikanan.

3. Perlindungan dan Konservasi Laut

Perlindungan dan konservasi laut adalah upaya kolaboratif yang melibatkan Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Ilmuwan, Masyarakat Sipil, dan Sektor Swasta untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

1. Penetapan kawasan konservasi
2. Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan
3. Pengendalian pencemaran laut
4. Pemulihan terumbu karang
5. Pendidikan dan kesadaran masyarakat
6. Penegakan hukum
7. Kerjasama Internasional.

Implementasi kegiatan pada Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antara lain :

1. Rehabilitasi ekosistem perairan laut berupa transplantasi terumbu karang
2. Kegiatan bulan cinta laut (bersih pantai, penanaman mangrove, kapasitas bulding bagi generasi muda pesisir terhadap pelestarian lingkungan)
3. Pembuatan Ranperda terkait rencana zona dan Kawasan konservasi di wilayah laut serta pulau-pulau kecil
4. MPA bagi kelompok masyarakat pesisir

4. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan komponen penting dari upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan laut secara keseluruhan. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan berupa :

1. Pemantauan aktifitas penangkapan ikan
2. Pengawasan hilirisasi produk perikanan
3. Pencegahan IUU Fishing
4. Pengendalian pencemaran laut
5. Pengelolaan zonasi dan Kawasan konservasi

Implementasi kegiatan di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan antara lain :

1. Pembinaan terhadap kelompok pengawas masyarakat perikanan
2. Sosialisasi tentang peraturan terbaru
3. Pengawasan terhadap pemanfaatn sumberdaya perikanan tangkap dari tindakan penggunaan API dan alat bantu penangkapan yang tidak sesuai aturan
4. Pengawasan terhadap hilirisasi atas produk hasil perikanan
5. Fasilitasi nelayan yang tertangkap oleh militer negara tetangga
6. Pencegahan konflik antar nelayan.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2024-2026
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator Sasaran RPD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja		
							2024	2025	2026
1	Meningkatnya kesejahteraan Petani	Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sub Sektor Perikanan	Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan	Produksi Perikanan	Ton/Tahun	682.628,53	690.820,07	690.109,91	682.628,53
				Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	Ton/Tahun	456.086,29	461.559,33	467.098,04	456.086,29
				Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	Ton/Tahun	226.542,25	229.260,76	232.011,89	226.542,25
				Tingkat Konsumsi Ikan	Persen	49,74	50,34	50,94	49,74
				Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	101	102	103	101
				Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Persen	48.000	75.000	78.000	48.000
				Rehabilitasi Ekosistem pesisir laut, dan pulau-pulau kecil	Hektar	101	102	103	101

3.5. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan Format Gender Analysis Pathway (GAP), Anggaran Gender (GBS) dan TOR/ KAK Pelaksanaan Kegiatan.

Pada rencana pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di dalam Renja tahun 2025 terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan yang disusun dengan Format GAP, GBS serta menyusun TOR/ KAK pelaksanaan Kegiatan antara lain :

Tabel 3.1. Sub Kegiatan 1 dengan FORM PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (PAG/GBS)

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan :	PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 mil Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
2	Indikator kinerja sub kegiatan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
3	Tujuan sub kegiatan	Meningkatkan produksi perikanan tangkap
4	Analisa situasi	Salah satu implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam adalah melalui kegiatan Asuransi Nelayan sebagai jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi nelayan. Jumlah nelayan di Sumatera Utara sebanyak 170.274 orang yang didominasi oleh laki-laki. Hingga tahun 2024 yang tercatat menerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera sebanyak 64.557 orang. Faktor Kesenjangan Profesi nelayan didominasi oleh laki-laki karena memerlukan kekuatan fisik dalam melakukan pekerjaannya. Nelayan baik nelayan laut maupun perairan darat utamanya memiliki keahlian mengoperasikan sampan dan alat penangkapan ikan yang tidak semua perempuan bisa melakukan. Namun demikian, beberapa perempuan juga berprofesi sebagai nelayan dengan jenis kegiatan penangkapan ikan yang tidak memerlukan kekuatan fisik yang cukup berat seperti nelayan kerang di pinggiran pantai, memancing atau menjala. Sebab Kesenjangan internal : 1. Peran fungsi pokja dan Focal Point belum maksimal 2. Belum adanya data terpilah yang update mengenai jumlah nelayan Wanita 3. Belum adanya penetapan kuota bagi perempuan penerima asuransi Sebab Kesenjangan Eksternal : 1. Belum adanya pengelompokan dan sosialisasi kegiatan penangkapan ikan yang bisa dilakukan oleh perempuan. Terbatasnya Anggaran Responsif Gender (ARG) untuk menampung bantuan premi asuransi nelayan bagi perempuan nelayan
5	Rencana Aksi	1. Memberikan sosialisasi dan Advokasi kepada tim Pokja dan Focal Point 2. Identifikasi jumlah perempuan yang berprofesi sebagai nelayan dan belum menerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan; 3. Koordinasi dengan Dinas Perikanan Kab/Kota untuk melakukan pelatihan ketrampilan penangkapan ikan bagi perempuan sehingga profesi perempuan nelayan bertambah. 4. Menetapkan Kuota khusus penerima Asuransi Nelayan
6	Alokasi Anggaran Output sub Kegiatan	Rp. 5.500.000.000
7	Dampak/hasil Output sub Kegiatan	Perlindungan Keselamatan Kerja dan Kesehatan kerja bagi Nelayan Wanita

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program: Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan: Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 mil Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Output sub kegiatan : Jumlah Nelayan Penerima Asuransi Tujuan Sub Kegiatan : Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap Sasaran : Nelayan	Salah satu implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam adalah melalui kegiatan Asuransi Nelayan sebagai jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi nelayan. Jumlah nelayan di Sumatera Utara sebanyak 170.274 orang yang didominasi oleh laki-laki. Hingga tahun 2024 yang tercatat menerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera sebanyak 64.557 orang.	Faktor Kesenjangan Profesi nelayan didominasi oleh laki-laki karena memerlukan kekuatan fisik dalam melakukan pekerjaannya. Nelayan baik nelayan laut maupun perairan darat utamanya memiliki keahlian mengoperasikan sampan dan alat penangkapan ikan yang tidak semua perempuan bisa melakukan. Namun demikian, beberapa perempuan juga berprofesi sebagai nelayan dengan jenis kegiatan penangkapan ikan yang tidak memerlukan kekuatan fisik yang cukup berat seperti nelayan kerang di pinggir pantai, memancing atau menjala.	Sebab Kesenjangan internal : 1.Peran fungsi pokja dan Focal Point belum maksimal 2.Belum adanya data terpilah yang update mengenai jumlah nelayan Wanita 3.Belum adanya penetapan kuota khusus wanita penerima asuransi	Sebab Kesenjangan Eksternal : 1.Belum adanya pengelompokkan dan sosialisasi kegiatan penangkapan ikan yang bisa dilakukan oleh perempuan. 2.Adanya stigma di masyarakat bahwa pekerjaan nelayan hanya cocok dilakukan oleh kaum pria	Reformulasi Tujuan : Peningkatan ketrampilan penangkapan ikan bagi perempuan nelayan dan pengalokasian bantuan premi asuransi nelayan bagi perempuan nelayan secara proporsional	Rencana Aksi : 1. Identifikasi jumlah perempuan yang berprofesi sebagai nelayan dan belum menerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan; 2. Koordinasi dengan Dinas Perikanan Kab/Kota untuk melakukan pelatihan ketrampilan penangkapan ikan bagi perempuan sehingga profesi perempuan nelayan bertambah. 3. Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan kepada Tim Pokja dan Focal Point Dinas Mengenai Kesetaraan Gender 4. Menetapkan Kuota khusus penerima Asuransi Nelayan	Data Dasar (Base-line) Jumlah Nelayan yang menerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan Tahun 2025 sebanyak 13.800 orang dengan perkiraan terdiri dari : - Laki-Laki: 12.275 Orang - Perempuan: 1.525 Orang	Indikator Gender Output : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Sumatera Utara Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebanyak 482.343,21 Ton Outcome : •Meningkatnya jumlah Nelayan Wanita yang menerima Premi Asuransi • Indikator Kinerja Jumlah nelayan Wanita yang menerima Asuransi Nelayan sebanyak 2000 orang Dampak : Perlindungan keselamatan kerja dan Kesehatan kerja bagi Nelayan Wanita

FORM KAK / TOR

Program		PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Sasaran Program		Nelayan
Kegiatan Sub Kegiatan		Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 mil Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Inpres 9 Th 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Th 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah 3. Peraturan Menteri PPPA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender 4. Surat Edaran 4 Menteri (Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) : no. 050/4379A/SJ., No. SE-46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan PUG Melalui Perencanaan Dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). 5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 51/ PERMEN- KP/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan Dan Perikanan di Daerah
	Gambaran Umum	Salah satu implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam adalah melalui kegiatan Asuransi Nelayan sebagai jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi nelayan. Jumlah nelayan di Sumatera Utara sebanyak 170.274 orang yang didominasi oleh laki-laki. Hingga tahun 2024 yang tercatat menerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera sebanyak 64.557 orang. Faktor Kesenjangan Profesi nelayan didominasi oleh laki-laki karena memerlukan kekuatan fisik dalam melakukan pekerjaannya. Nelayan baik nelayan laut maupun perairan darat utamanya memiliki keahlian mengoperasikan sampian dan alat penangkapan ikan yang tidak semua perempuan bisa melakukan. Namun demikian, beberapa perempuan juga berprofesi sebagai nelayan dengan jenis kegiatan penangkapan ikan yang tidak memerlukan kekuatan fisik yang cukup berat seperti nelayan kerang di pinggiran pantai, memancing atau menjala. Sebab Kesenjangan internal : 1. Peran fungsi pokja dan Focal Point belum maksimal 2. Belum adanya data terpilah yang update mengenai jumlah nelayan Wanita Sebab Kesenjangan Eksternal : 1. Belum adanya pengelompokan dan sosialisasi kegiatan penangkapan ikan yang bisa dilakukan oleh perempuan. 2. Terbatasnya Anggaran Responsif Gender (ARG) untuk menampung bantuan premi asuransi nelayan bagi perempuan nelayan
Sub Kegiatan	Uraian Kegiatan	1. Tahapan Kegiatan • Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota dalam rangka penetapan penerima Asuransi Nelayan • Melakukan pengumpulan dan verifikasi terkait data nelayan penerima Asuransi • Melakukan koordinasi dan pendaftaran peserta baru untuk nelayan penerima asuransi ke BPJS Ketenagakerjaan • Melaksanakan pendistribusian kartu peserta Asuransi melalui Dinas Kelautan dan

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

		Perikanan Kabupaten / Kota 2. Sasaran Program: Pengelolaan Perikanan Tangkap - Kegiatan: Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 mil - Sub Kegiatan : Penyediaan Prasana Usaha Perikanan Tangkap - Output sub kegiatan: Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap - Tujuan Sub kegiatan: Meningkatkan produksi perikanan tangkap - Sasaran Sub Kegiatan : Nelayan 3. Penerima manfaat - Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Sumatera Utara - Meningkatnya jumlah Nelayan Wanita di Provinsi Sumatera Utara yang menerima premi asuransi - Meningkatnya kemampuan / keterampilan nelayan Wanita di Provinsi Sumatera Utara
	Indikator Kinerja	- Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebanyak 482.343,21 Ton - Jumlah nelayan Wanita yang telah mendapatkan premi Asuransi 1.525 orang
	Batasan Kegiatan	Pemberian Premi Asuransi Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Nelayan
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan keikutsertaan nelayan Wanita pada Kelompok nelayan penerima bantuan dalam rangka menunjang peningkatan produksi perikanan tangkap
Cara Pelaksanaan Sub Kegiatan		• Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota dalam rangka penetapan penerima Asuransi Nelayan • Melakukan pengumpulan dan verifikasi terkait data nelayan penerima Asuransi • Melakukan koordinasi dan pendaftaran peserta baru untuk nelayan penerima asuransi ke BPJS Ketenagakerjaan • Melaksanakan pendistribusian kartu peserta Asuransi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota
Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan		23 Kab Kota
Pelaksana & Penanggungjawab Sub Kegiatan		Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
Jadwal		Tahun 2025
Biaya		Rp. 5.500.000.000,-

Tabel 3.2. Sub Kegiatan 2 dengan FORM PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (PAG/GBS)

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan :	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 mil Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2	Indikator kinerja sub kegiatan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3	Tujuan sub kegiatan	Meningkatkan produksi perikanan tangkap
4	Analisa situasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara merupakan Organisasi perangkat Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Nelayan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan dapat dilakukan dengan memberikan bantuan berupa sarana Usaha Perikanan Tangkap kepada kelompok nelayan yang sudah memenuhi syarat.

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

		Jumlah kelompok Nelayan yang saat ini terdaftar di Provinsi Sumatera Utara sebanyak lebih kurang 100 kelompok dengan perbandingan jumlah anggota laki laki sebanyak 80 % dan jumlah anggota kelompok perempuan sebanyak 20 % di setiap kelompok nelayan yang ada. Bantuan Sarana yang diberikan kepada kelompok nelayan berupa Alat Bantuan Penangkapan Ikan, Mesin Kapal Perikanan dan Mesin Genset Isu dan Faktor Kesenjangan Gender dapat ditemukan dengan masih sedikitnya Wanita nelayan yang terdaftar dan aktif dalam kelompok nelayan penerima bantuan, selain itu Wanita juga masih kurang diberdayakan dalam penggunaan bantuan Sarana yang diberikan Penyebab Internal nya berupa : 1. Peran fungsi pokja dan Focal Point yang belum maksimal 2. Belum adanya data terpilah yang update mengenai jumlah nelayan Wanita 3. Belum adanya form verifikasi mengenai syarat penerima bantuan Penyebab eksternal nya berupa : 1. Adanya Stigma Masyarakat bahwa Laki laki lebih mampu bekerja sebagai nelayan 2. Kurangnya Kemampuan Wanita dalam menggunakan Sarana Prasarana Perikanan	
5	Rencana Aksi	Aktivitas 1	Memberikan sosialisasi dan Advokasi kepada tim Pokja dan Focal Point
		Aktivitas 2	Menyusun data terpilah jumlah nelayan Wanita dan pria
		Aktivitas 3	Memberikan Pelatihan kepada Nelayan Wanita
6	Alokasi Anggaran Output sub Kegiatan		Rp. 3.500.000.000
7	Dampak/hasil Output sub Kegiatan		Meningkatnya jumlah nelayan wanita yang dapat berperan aktif dalam kelompok kelompok nelayan

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program: Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan: Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 mil Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Output Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Tujuan Sub kegiatan: Meningkatkan produksi perikanan tangkap Sasaran Sub Kegiatan : Masyarakat / Kelompok Nelayan	1. Jumlah kelompok Nelayan yang ada di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 100 Kelompok 2. Jumlah anggota laki laki dalam setiap kelompok nelayan rata rata sebanyak 30 s.d 40 orang, dan jumlah anggota perempuan di tiap kelompok rata rata sebanyak 10 s.d 15 orang. 3. Bantuan yang diberikan kepada kelompok nelayan berupa Alat Bantuan Penangkapan Ikan, Mesin	Isu Gender : Jumlah Nelayan Laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan Nelayan Wanita khususnya dalam Kelompok Nelayan.			Kebijakan dan Rencana Ke Depan : Menyusun dan menetapkan keseimbangan antara jumlah nelayan laki-laki dan nelayan wanita.		Pengukuran Hasil : Peningkatan produksi perikanan tangkap yang dilakukan oleh nelayan wanita.	
		Faktor Kesenjangan Akses : Masih sedikitnya Wanita nelayan yang terdaftar dan aktif dalam kelompok nelayan penerima bantuan Partisipasi : Jumlah Anggota Nelayan	Sebab Kesenjangan Internal 4. Peran fungsi pokja dan Focal Point belum maksimal 5. Belum adanya data terpilah yang update mengenai	Sebab Kesenjangan Eksternal 1. Kurangnya Kemampuan Wanita dalam menggunakan Sarana Prasarana Perikanan 2. Adanya Stigma Masyarakat bahwa Laki laki lebih mampu	Reformulasi Tujuan Meningkatkan keikutsertaan nelayan Wanita pada Kelompok nelayan penerima bantuan dalam rangka menunjang peningkatan produksi perikanan	Rencana Aksi 1. Memberikan sosialisasi dan Advokasi Pokja dan Focal Point 2. Menyusun data terpilah jumlah nelayan Wanita dan pria	Data Dasar (Base-line) Jumlah Wanita yang terdaftar dalam Kelompok Nelayan sebanyak 300 orang Jumlah Wanita Nelayan yang pernah mendapat pelatihan sebanyak 120 orang	Indikator Gender Output : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Sumatera Utara Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebanyak

	Kapal Perikanan dan Mesin Genset	Pria lebih banyak daripada Wanita Kontrol : Perempuan kurang diberi kesempatan dalam menggunakan bantuan sarana prasarana yang diberikan Manfaat : Masih rendahnya kemampuan Wanita dalam menggunakan sarana prasarana perikanan	jumlah nelayan Wanita 6. Belum adanya form verifikasi mengenai penerima bantuan	bekerja sebagai nelayan	tangkap	3. Memberikan Pelatihan kepada Nelayan Wanita	482.343,21 Ton Outcome : • Rumusan Kinerja Meningkatnya jumlah Nelayan Wanita di Provinsi Sumatera Utara Indikator Kinerja: Jumlah nelayan Wanita yang terdaftar dalam kelompok nelayan sebanyak 300 orang Dampak : Jumlah Nelayan Wanita agar ditingkatkan
--	----------------------------------	---	---	-------------------------	---------	---	--

FORM KAK / TOR

Program :		PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Sasaran Program :		Masyarakat / Kelompok Nelayan
Kegiatan :		Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 mil
Sub Kegiatan :		Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Inpres 9 Th 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Th 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah 3. Peraturan Menteri PPPA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender 4. Surat Edaran 4 Menteri (Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) : no. 050/4379A/SJ., No. SE-46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan PUG Melalui Perencanaan Dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). 5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 51/ PERMEN- KP/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan Dan Perikanan Di Daerah
	Gambaran Umum	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara merupakan Organisasi perangkat Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Nelayan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan dapat dilakukan dengan memberikan bantuan berupa sarana Usaha Perikanan Tangkap kepada kelompok nelayan yang sudah memenuhi syarat. Jumlah kelompok Nelayan yang saat ini terdaftar di Provinsi Sumatera Utara sebanyak lebih kurang 100 kelompok dengan perbandingan jumlah anggota laki laki sebanyak 80 % dan jumlah anggota kelompok perempuan sebanyak 20 % di setiap kelompok nelayan yang ada. Bantuan Sarana yang diberikan kepada kelompok nelayan berupa Alat Bantuan Penangkapan Ikan, Mesin Kapal Perikanan dan Mesin Genset Isu dan Faktor Kesenjangan Gender dapat ditemukan dengan masih sedikitnya Wanita nelayan yang terdaftar dan aktif dalam kelompok nelayan penerima bantuan, selain itu Wanita juga masih kurang diberdayakan dalam penggunaan bantuan Sarana yang diberikan Penyebab Internal nya berupa : 1. Peran fungsi pokja dan Focal Point yang belum maksimal 2. Belum adanya data terpilah yang update mengenai jumlah nelayan Wanita 3. Belum adanya form verifikasi mengenai syarat penerima bantuan Penyebab eksternal nya berupa : 1. Adanya Stigma Masyarakat bahwa Laki laki lebih mampu bekerja sebagai nelayan 2. Kurangnya Kemampuan Wanita dalam menggunakan Sarana Prasarana Perikanan

	Uraian Kegiatan	4. Tahapan Kegiatan • Menerima proposal permintaan bantuan sarana usaha perikanan tangkap dari Kelompok Nelayan calon penerima bantuan. • Melakukan Verifikasi data Kelompok Nelayan Calon Penerima Bantuan • Melakukan peninjauan Langsung ke lokasi tempat kelompok nelayan calon penerima bantuan beroperasi • Menetapkan jenis bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan calon kelompok nelayan penerima bantuan • Mendistribusikan bantuan berupa sarana usaha perikanan tangkap kepada kelompok nelayan yang telah disetujui / ditetapkan • Melaksanakan evaluasi terkait bantuan sarana usaha perikanan tangkap yang telah didistribusikan 5. Sasaran Program: Pengelolaan Perikanan Tangkap - Kegiatan: Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Laut sampai dengan 12 mil - Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Output sub kegiatan: Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap - Tujuan Sub kegiatan: Meningkatkan produksi perikanan tangkap - Sasaran Sub Kegiatan : Masyarakat / Kelompok Nelayan 6. Penerima manfaat - Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Sumatera Utara - Meningkatnya jumlah Nelayan Wanita di Provinsi Sumatera Utara - Meningkatnya kemampuan / keterampilan nelayan Wanita di Provinsi Sumatera Utara
	Indikator Kinerja	- Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebanyak 482.343,21 Ton - Jumlah nelayan Wanita yang terdaftar dalam kelompok nelayan sebanyak 300 orang
	Batasan Kegiatan	Pemberian Bantuan Sarana Perikanan Tangkap kepada Kelompok Nelayan yang sudah terverifikasi
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan keikutsertaan nelayan Wanita pada Kelompok nelayan penerima bantuan dalam rangka menunjang peningkatan produksi perikanan tangkap
Cara Pelaksanaan Sub Kegiatan		• Menerima proposal permintaan bantuan sarana usaha perikanan tangkap dari Kelompok Nelayan calon penerima bantuan. • Melakukan Verifikasi data Kelompok Nelayan Calon Penerima Bantuan • Melakukan peninjauan Langsung ke lokasi tempat kelompok nelayan calon penerima bantuan beroperasi • Menetapkan jenis bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan calon kelompok nelayan penerima bantuan • Mendistribusikan bantuan berupa sarana usaha perikanan tangkap kepada kelompok nelayan yang telah disetujui / ditetapkan • Melaksanakan evaluasi terkait bantuan sarana usaha perikanan tangkap yang telah didistribusikan
Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan		6 Kab/ Kota (Gunung Sitoli, Nias Selatan, Nias Utara, Sibolga, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal)
Pelaksana & Penanggungjawab Sub Kegiatan		Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
Jadwal		Tahun 2025
Biaya		Rp. 3.500.000.000,-

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki daya ungkit besar terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2024-2026 sesuai periode Renstra tahun 2024-2026 telah ditetapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu :

Tabel 4.1
Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Defenisi Operasional	Formulasi
Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	Jumlah Produksi Hasil Perikanan	Produksi Perikanan = Jumlah Hasil Perikanan
	Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Tangkap dalam Waktu Tertentu	Produksi Perikanan Tangkap = Jumlah Hasil Perikanan Tangkap
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Budidaya dalam Waktu Tertentu	Produksi Perikanan Budidaya = Jumlah Hasil Perikanan Budidaya
	Tingkat Konsumsi Ikan	Tingkat Konsumsi Masyarakat Sumatera Utara	Tingkat Konsumsi Ikan adalah

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Defenisi Operasional	Formulasi
		terhadap Komoditas Ikan yang dikonversi dalam Satuan kg per-kapita pertahun	Penjumlahan dari jumlah konsumsi ikan rumah tangga dengan jumlah konsumsi diluar rumah tangga dan konsumsi ikan tidak tercatat (AKI = A+B+C)
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Perbandingan Indeks harga yang diterima nelayan (It) terhadap indeks harga yang dibayar nelayan (Ib)	NTN = Harga yang diterima nelayan (It)/ harga yang dibayar nelayan (Ib)
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Perbandingan indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (Ib)	NTPi = Harga yang diterima nelayan (It)/ harga yang dibayar pembudidaya (Ib)
	Rehabilitasi Ekosistem pesisir laut, dan pulau-pulau kecil	Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang adalah upaya memperbaiki ekosistem terumbu karang yang telah rusak menjadi berfungsi kembali	Jumlah kawasan rehabilitasi terumbu karang = terumbu karang awal + terumbu karang baru/ buatan

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya tujuan RPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut (*Lampiran*).

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2				3		4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas KP	6 Dokumen	1.000.000.000	APBD		6 Dokumen	1.100.000.000
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas KP	4 Laporan	800.000.000	APBD		4 Laporan	880.000.000
3	25	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dinas KP	4 Data	100.000.000	APBD		4 Data	110.000.000

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas KP	1 Berita Acara	200.000.000	APBD		1 Berita Acara	220.000.000
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas KP	109 Orang/ Bulan	18.384.894.866	APBD		109 Orang/ Bulan	20.223.384.353
3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas KP	1 Dokumen	250.000.000	APBD		1 Dokumen	275.000.000
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas KP	1 Laporan	100.000.000	APBD		1 Laporan	110.000.000

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
3	25	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas KP	2 Dokumen	200.000.000	APBD		2 Dokumen	220.000.000
3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas KP	2 Laporan	100.000.000	APBD		2 Laporan	110.000.000
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
3	25	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas KP	5 Unit	150.000.000,00	APBD		5 Unit	165.000.000
3	25	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Dinas KP	109 Paket	300.000.000,00	APBD		109 Paket	330.000.000
3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas KP	20 Orang	250.000.000,00	APBD		20 Orang	275.000.000
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Dinas KP	1 Paket	50.000.000,00	APBD		1 Paket	55.000.000

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Disediakan							
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas KP	1 Paket	30.000.000,00	APBD		1 Paket	33.000.000
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas KP	2 Paket	325.000.000,00	APBD		2 Paket	357.500.000
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas KP	2 Paket	155.000.000,-	APBD		2 Paket	170.500.000
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas KP	12 Laporan	150.000.000,-	APBD		12 Laporan	165.000.000
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Provinsi	2 Laporan	400.000.000,-	APBD		2 Laporan	440.000.000
3	25	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas KP	10 Dokumen	115.000.000,-	APBD		10 Dokumen	126.500.000
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
3	25	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Provsu	4 Unit	600.000.000,-	APBD		4 Unit	660.000.000

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas KP	6 Paket	143.187.254,-	APBD		6 Paket	157.505.979
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provsu	20 Unit	500.000.000,-	APBD		20 Unit	550.000.000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provsu	1 Laporan	80.000.000,-	APBD		1 Laporan	88.000.000
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provsu	1 Laporan	550.000.000,-	APBD		1 Laporan	605.000.000
3	25	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas KP	1 Laporan	30.000.000,-	APBD		1 Laporan	33.000.000
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas KP	1 Laporan	4.650.000.000,-	APBD		1 Laporan	5.115.000.000
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	350.000.000,-	APBD		10 Unit	385.000.000
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provsu	10 Unit	210.000.000,-	APBD		10 Unit	231.000.000
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	400.000.000,-	APBD		2 Unit	440.000.000
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi								
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44000 H	1.000.000.000,-	APBD		44000 H	1.100.000.000

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 H	1.550.000.000,-	APBD		50 H	1.705.000.000
3	25	02	1.01	0013	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	250.000.000,-	APBD		1 Dokumen	275.000.000
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi								
3	25	02	1.02	0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000.000,-	APBD		1 Dokumen	165.000.000
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	286.666.712,-	APBD		100 Orang	315.333.383

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil								
3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit	5.500.000.000,-	APBD		25 Unit	6.050.000.000
3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit	3.500.000.000,-	APBD		25 Unit	3.850.000.000
3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
3	25	03	1.02	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit	1.400.000.000,-	APBD		25 Unit	1.540.000.000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								
3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	04	1.01	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Rekomendasi	100.000.000,-	APBD		10 Rekomendasi	110.000.000
3	25	04	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Rekomendasi	100.000.000,-	APBD		10 Rekomendasi	110.000.000
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut								
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	1.000.000.000,-	APBD		50 Orang	1.100.000.000
3	25	04	1.05	0010	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	2.000.000.000,-	APBD		7 Unit	2.200.000.000

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	04	1.05	0014	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	1.000.000.000,-	APBD		7 Unit	1.100.000.000
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil								
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Pelaku Usaha	250.000.000,-	APBD		20 Pelaku Usaha	275.000.000
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Pelaku Usaha	750.000.000,-	APBD		20 Pelaku Usaha	825.000.000

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Pelaku Usaha	200.000.000,-	APBD		10 Pelaku Usaha	220.000.000
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Kelompok Masyarakat	600.000.000,-	APBD		12 Kelompok Masyarakat	660.000.000
3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Pelaku Usaha	100.000.000,-	APBD		20 Pelaku Usaha	110.000.000
3	25	05	1.02	0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Pelaku Usaha	100.000.000,-	APBD		10 Pelaku Usaha	110.000.000

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						provinsi							
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								
3	25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
3	25	06	1.01	0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Rekomendasi	100.000.000,-	APBD		40 Rekomendasi	110.000.000
3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
3	25	06	1.03	0001	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	450.000.000,-	APBD		2 Dokumen	495.000.000
3	25	06	1.03	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit Usaha	250.000.000,-	APBD		10 Unit Usaha	275.000.000

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dan Fasilitas							
					UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan								
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	225.000.000,-	APBD		1 Laporan	247.500.000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar								
3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	600.000.000,-	APBD		1 Kegiatan	660.000.000

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	400.000.000,-	APBD		1 Kegiatan	440.000.000
					UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello								
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,-	APBD		1 Laporan	55.000.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi								
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		600.000.000	APBD			660.000.000
					UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai - Asahan								
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	245.000.000,-	APBD		1 Laporan	269.500.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil								
3	25	03	1.01	0005	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	1 Unit	1.000.000.000,-	APBD		1 Unit	1.100.000.000

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kel/Desa						
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi								
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	3.000.000.000,-	APBD		1 Unit	3.300.000.000
					UPTD Budidaya Ikan Air Payau dan Laut								
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	258.000.000,-	APBD		1 Laporan	283.800.000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut								
3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	1.403.650.000,-	APBD		2 Unit	1.544.015.000
3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	855.196.000,-	APBD		1 Unit	940.715.600
3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat								

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU/ RENCANA 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1.700.000.000,-	APBD		1 Unit	1.870.000.000

BAB V

PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 yang memuat rencana dalam kurun waktu satu tahun telah disusun sesuai dengan tahapannya dengan melibatkan semua pihak yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara telah memperhatikan permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi, juga memperhitungkan tantangan dan peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan terhadap pembangunan perikanan dan kelautan di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi, misi yang ditetapkan, ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan yang dihimpun berdasarkan Musrenbang Provinsi Sumatera Utara. Program dan Rencana Kerja yang dihasilkan melalui Sinkronisasi tersebut dipadukan dan disinkronkan dengan rencana program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang dituangkan dalam Renja ini.

Program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diupayakan agar terlaksana dengan maksimal berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel, dan untuk keberhasilan dari program dan kegiatan ini sangat diperlukan partisipasi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan juga

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan pada akhir tahun wajib dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan, dan mengetahui penyebab masalah yang menghambat pencapaian tujuan, sasaran dimana hasil dari evaluasi tahunan tersebut dituangkan kedalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Tahun 2025 disusun sebagai pedoman Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan program dan kegiatan TA 2025. Semoga Renja Tahun 2025 ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap Aparatur dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara serta mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan.

Medan, Juni 2024

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan
Provinsi Sumatera Utara

Hamdan Sukri Siregar, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19770826 200312 1 004

L A M P I R A N

Tabel T. T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

LAMPIRAN USULAN MUSRENBANG ZONA PANTAI BARAT

No	KABUPATEN/KOTA	USULAN	KETERANGAN	STATUS
	KAB. PADANG LAWAS	Bantuan Bioflok Ikan Lele	-	Diakomodir
		Bantuan Benih Ikan Untuk Lubuk Larangan	-	Diakomodir
		Bantuan Mesin Cetak Pellet Ikan	-	Diakomodir
		Bantuan Mesin Pengolahan Ikan (Mesin Pembuat Ikan Asap)	Dibahas Di Forum OPD	Belum Diakomodir
		Bantuan calon induk ikan Mas, Nila, Baung, Tawes dan Lele serta pakan ikan	Dibahas Di Forum OPD	Belum Diakomodir
	KAB. MANDAILING NATAL	Pengadaan dan Penanaman Mangrove	-	Diakomodir
		Pengadaan Alat Penangkapan Ikan (API)	-	Diakomodir
		Pengadaan Bibit Kepiting Bakau dan Pakan	-	Belum Diakomodir
		Pengadaan bibit ikan nila dan lele serta pakan	-	Diakomodir
		Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI)	-	Belum Diakomodir
	KAB. PADANG LAWAS UTARA	Sosialisasi Gerakan Gemar Makan Ikan (Gemarikan)	Belum termasuk Lokus	Belum Diakomodir
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan dalam Satu Kabupaten/Kota (Restocking Ikan)	-	Diakomodir
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Pengadaan Kolam Bioflok)	-	Diakomodir
	KOTA SIBOLGA	Pengadaan Rumah Ikan	-	Diakomodir
		Pengadaan Kolam Bioflok	-	Belum Diakomodir

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

	benih ikan kerapu	-	Diakomodir
	Pakan Ikan Kerapu	-	Diakomodir
	bibit lele	-	Diakomodir
	Pakan	-	Diakomodir
	Penerbitan Asuransi Nelayan	-	Belum Diakomodir
	pengadaan Coolbox 200 L	-	Diakomodir
	Pengadaan Jaring Salam	-	Diakomodir
	Transplantasi Terumbu Karang	-	Diakomodir
	pengadaan Mesin Motor stempel	-	Diakomodir
	Pengadaan Keramba Jaring apung 6 Kolom	-	Belum Diakomodir
KAB. TAPANULI SELATAN	Pengadaan Alat Tangkap ikan Gillnet dan Bubu/pangilar di Perairan Umum	Dibahas Di Forum OPD	Diakomodir
	Pengadaan Bibit Ikan Restocking Danau Siais	Dibahas Di Forum OPD	Diakomodir
	Pengadaan Alat Tangkap Ikan Trammel Net di Perairan Laut	Dibahas Di Forum OPD	Diakomodir
KAB. TAPANULI TENGAH	Pengadaan bubu	-	Diakomodir
	Pengadaan jaring ikan ramah lingkungan (Gillnet)	-	Diakomodir
	Pengadaan fish finder	-	Diakomodir
	Pengadaan mesin perahu 9 PK	-	Diakomodir
	Pengadaan mesin perahu 15 PK	-	Diakomodir
	Pengadaan Genset	-	Diakomodir
	Pengadaan apartemen ikan	-	Diakomodir
	Pengadaan cool box	-	Diakomodir
KOTA PADANG SIDIMPUAN	Pengadaan Benih ikan Jurung dan ikan Baung	-	Diakomodir
	Pengadaan Mesin Automatic Fedeer	-	Diakomodir

		Pengadaan Benih Ikan Mas, nila, lele dan Gurami untuk Kelompok	-	Diakomodir

LAMPIRAN USULAN MUSRENBANG ZONA PANTAI TIMUR

No	KABUPATEN/KOTA	USULAN	KETERANGAN	STATUS
	KAB. ASAHAN	Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	dibahas forum opd	Belum Diakomodir
		Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	dibahas forum opd	Belum Diakomodir
		Pengembangan Budidaya Ikan Jurung	dibahas forum opd	Belum Diakomodir
	KAB. DELI SERDANG	Pengadaan Gill Net Mata 400	-	Belum Diakomodir
		Pengadaan Mesin Sampan 28 PK (Dongfeng)	-	Diakomodir
		Pengadaan Paket Budidaya Ikan Nila Salin	-	Diakomodir
		Pengadaan Gill Net Mata 300	-	Belum Diakomodir
		Pengadaan Jaring Millenium	-	Diakomodir
		Pengadaan Sampan 5 GT	sedang dilakukan moratorium oleh kementerian terkait	Belum Diakomodir
		Pengadaan bibit udang windu, pakan, genset	-	Diakomodir

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

		Pengadaan Mesin Sampan 23 PK (Dongfeng)	-	Diakomodir
		Pengadaan Paket Budidaya Ikan Siakap	-	Diakomodir
		Pengadaan Paket Budidaya Udang Vanname	-	Diakomodir
	KAB. SERDANG BEDAGAI	Pelatihan Laminasi	-	Diakomodir
		Tersedianya Bantuan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) bagi Nelayan (Budidaya Kakap)	-	Diakomodir
		Penyediaan Bantuan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) Bagi Nelayan (Budidaya Udang)	-	Diakomodir
		Penyediaan Alat Tangkap Bubu Gurita	-	Diakomodir
		Penyediaan bantuan Alat Tangkap Jaring Kembang/Senangin Mata 400	diberikan bantuan mata 100	Belum Diakomodir
		Penyediaan Bantuan Alat Tangkap Jaring Udang Mata 200	-	Belum Diakomodir
		Penyediaan Bantuan Perahu/Kapal Penangkap Ikan uk. 1-2 GT beserta kelengkapannya	-	Diakomodir
		Penyediaan Bantuan Perahu/Kapal Penangkap Ikan uk. 5 GT beserta kelengkapannya (Jaring Kembang Mata 400)	sedang ada moratorium	Belum Diakomodir
		Tersedianya Bantuan Perahu/Kapal Penangkap Ikan uk. 1-2 GT	-	Diakomodir

		beserta kelengkapannya		
		Penyediaan Bantuan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) Bagi Nelayan (Budidaya Udang)	-	Diakomodir
		Pelatihan Mesin Kapal	-	Diakomodir
		Penyediaan Alat Tangkap Jaring Bawal Mata 400	agar di sulkan melalui APBD Kabupaten	Belum Diakomodir
		Penyediaan Bantuan Alat Tangkap Jaring Kepiting Mata 100	-	Diakomodir
		Penyediaan Alat Tangkap Bubu Gurita di Kecamatan Teluk Mengkudu	-	Diakomodir
		Penyediaan Bantuan Alat Navigasi (Fish Finder/GPS)	-	Diakomodir
		Asuransi Nelayan	-	Diakomodir
	KAB. BATU BARA	Pembangunan Tambat Labuh	agar nelayan di urus izin kapal dan status lahan terkait dbahas di forum OPD	Diakomodir
		Paket Bantuan Budidaya Ikan Kerapu	-	Diakomodir
		Pengadaan Jaring Gembung	-	Diakomodir
		Pengadaan Mesin Diesel 24 PK	-	Diakomodir
		Paket Bantuan Budidaya Udang Vaname	-	Diakomodir
		Peralatan Pengasina n Ikan	-	Diakomodir
		Paket Bantuan Freezer Uk. 1.000 L	-	Diakomodir
		Peralatan Pengolaha n Kembung Rebus/Pi ndang	-	Diakomodir

		Paket Bantuan Budidaya Kerang	-	Diakomodir
	KAB. LABUHANBATU	Pengadaan Benih Ikan	Tolong dilengkapi proposal permintaan bantuannya, agar bisa diketahui Alat Tangkap Ikan apa yang diminta	Diakomodir
		Pengadaan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan	Tolong dilengkapi proposal permintaan bantuannya, agar bisa diketahui bibit apa yang diminta	Diakomodir
	KAB. LABUHANBATU SELATAN	Penyediaan Benih ikan gurami	-	Diakomodir
		Penyediaan Benih Ikan Lele	-	Diakomodir
		Penyediaan Benih Ikan Patin	-	Diakomodir
		Pakan Ikan	-	Diakomodir
		Penyediaan alat tangkap ikan	-	Diakomodir
	KAB. LABUHANBATU UTARA	penyediaan Cool Box	Tolong dilengkapi proposal permintaan bantuannya -	Diakomodir
		penyediaan alat tangkap ikan BUBU	Tolong dilengkapi proposal permintaan bantuannya	Diakomodir
		penyediaan alat tangkap ikan JARING BELAH PANTAI	Hanya diperbolehkan untuk penangkapan jalur 1A Mata Jaring minimal 1 inchi Panjang tali ris atas maksimal 300 meter Tolong dilengkapi proposal permintaan bantuannya	Belum Diakomodir
	KOTA BINJAI	Bantuan Cool Box	-	Diakomodir
	KOTA MEDAN	Pengadaan Jaring Insang	-	Diakomodir

	KOTA TEBING TINGGI	Bantuan Benih Ikan Gurame (38.000 ekor) Pakan Ikan (98.000 kg) Bantuan Calon Induk Ikan Nila (1.200 ekor) Bantuan Alat Pembuat Pakan Ikan (2 unit) Benih Ikan Lele (35.000 ekor) Benih Ikan Nila (7.500 ekor) Keramba Ikan (30 unit) Kolam Terpal (Budisan) (110 unit)	Tolong dilengkapi proposalnya permintaan bantuannya	Diakomodir
--	---------------------------	--	---	------------

LAMPIRAN USULAN MUSRENBANG ZONA KEPULAUAN NIAS

No	KABUPATEN/KOTA	USULAN	KETERANGAN	STATUS
	KOTA GUNUNG SITOLI	Pengadaan rumah ikan, Pengadaan Rumpon, Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan, Pengadaan Kapal Perikanan 6 GT dan Pengadaan Sampan Bermotor	Pengadaan kapal perikanan 6 GT tidak diakomodir dan lainnya dapat diakomodir dan akan dibahas lebih lanjut di forum opd	Diakomodir
		Pengadaan Rumah Ikan, Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan, Pengadaan Kapal Perikanan 6 GT dan Pengadaan Sampan Bermotor		Belum Diakomodir
	KABUPATEN NIAS	Bantuan Bibit Ikan sebanyak 50.000 ekor	ikan lele, mas, nila, Gurame	Diakomodir
		BANTUAN Perahu Mesin 3 GT sebanyak 10 Unit	Dibawah 28 PK	Diakomodir
		Bantuan Perahu Mesin 0,5 GT	Maksimal 28 PK	Diakomodir
		Bantuan Peralatan pancing sebanyak 300 Set		Diakomodir
		Bantuan Peralatan pancing		Diakomodir

		sebanyak 300 Set		
		Bantuan Peralatan pancing sebanyak 300 Set		Diakomodir
		Bantuan Coolbox sebanyak 100 Unit		Diakomodir
		Bantuan Coolbox sebanyak 100 Unit		Belum Diakomodir
	KABUPATEN NIAS SELATAN	Alat Bantu Penangkapan Ikan Fish Finder + GPS		Diakomodir
		Pengadaan Tramel Net	dibahas di forum opd	Diakomodir
		Pembangunan Kolam Ikan Permanen		Diakomodir
		Pengadaan Kolam Fiberglass		Diakomodir
		Pengadaan Pakan Ikan		Diakomodir
		Pengadaan Benih Ikan Air Tawar jenis ikan Bawal, Lele, Gurame, dan Patin		Diakomodir
		Pengadaan Induk Ikan Tawar Jenis Bawal, Lele, Gurame, Patin		Belum Diakomodir
		Pengadaan Gill Net		Diakomodir
		Pengadaan CollBox 200 Liter		Diakomodir
		Pengadaan Mesin KAPAL Penangkapan Ikan Uk 6 GT	Maksimal 28 PK	Diakomodir
		Pengadaan Mesin KAPAL Penangkapan Ikan Uk 6 GT		Diakomodir
		Pengadaan Kolam Fiberglass		Belum Diakomodir

		Pengadaan Induk Ikan Tawar Jenis Bawal, Lele, Gurame, Patin		Belum Diakomodir
		Pembangunan Kolam Ikan Permanen		Belum Diakomodir
		Pengadaan CollBox 200 Liter		Belum Diakomodir
		Pengadaan Benih Ikan Air Tawar jenis ikan Bawal, Lele, Gurame, dan Patin		Belum Diakomodir
		Pengadaan Gill Net		Belum Diakomodir
		Pembangunan Kolam Terpal Bundar Fullset		Diakomodir
		Pengadaan Pakan Ikan		Belum Diakomodir
		Pengadaan Gill Net		Belum Diakomodir
		Pembangunan Kolam Terpal Bundar Fullset		Belum Diakomodir
		Pengadaan Induk Ikan Tawar Jenis Bawal, Lele, Gurame, Patin		Belum Diakomodir
	KABUPATEN NIAS UTARA	Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkapan Ikan Uk 3 s.d 5 GT berserta Perlengkapannya		Belum Diakomodir
		Penanaman tanaman vegetasi di Kec. Sawo dan Kec. Afulu	dibahas di forum perangkat daerah	Diakomodir
		Pembangunan tambatan perahu/ jetty di desa hiligeoafia Kec. Lotu		Belum Diakomodir
		Transplatasi terumbu karang di pantai turelotu Kec. Lahewa		Diakomodir
		Pengadaan Peralatan selam untuk pengelolaan sumberdaya ikan	dibahas di forum perangkat daerah	Diakomodir

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

		Pengadaan induk Ikan Air Tawar dan Pakan untuk balai Benih Ikan UPTD Simangani Desa Ombolata Kec. Alasa		Diakomodir
		Pengadaan Alat Penangkapan Rawai Tuna, Rawai Kakap, dan Alat Tangkap Jaring		Diakomodir
		Pengadaan Keramba Jaring Apung Budidaya pembesaran Lobster	dibahas di forum perangkat daerah	Diakomodir
		Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkapan Ikan Uk Kurang dari 10 GT berserta Perlengkapannya	dibahas di forum perangkat daerah	Belum Diakomodir
		Pengadaan Coolbox		Diakomodir
		Pengadaan alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan		Belum Diakomodir
		Pembangunan pabrik es di Kelurahan Pasar Lahewa	dibahas di forum perangkat daerah	Diakomodir
		Pengadaan Saranan dan Prasaranan Pengolahan Ikan Rumah Asap, Rumah Rebus, Peralatan Pengeringan, Keranjang Ikan		Diakomodir
		Pengadaan Saranan dan Prasaranan Pengolahan Ikan Rumah Asap, Rumah Rebus, Peralatan Pengeringan, Keranjang Ikan		Belum Diakomodir
		Pengadaan Alat Peangkapan Ikan Ramah Lingkungan Jaring Gill Net		Belum Diakomodir

		Penanaman tanaman vegetasi di Kec. Sawo dan Kec. Afulu		Belum Diakomodir
		Pengadaan Benih Ikan Air Tawar dan Pakan bagi Kelompok		Diakomodir
		Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan		Belum Diakomodir Desk
		Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan		Belum Diakomodir Desk
		Pengadaan Rumpon bagi Kelaompok Nelayan	dibahas di forum Perangkat Daerah	Diakomodir Desk
		pengadaan Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan		Diakomodir Desk
		Pengadaan Keramba Jaring Apung budidaya pembesaran Lobster		Belum Diakomodir Desk
		pengadaan Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan		Belum Diakomodir Desk
		Pengadaan Coolbox		Belum Diakomodir Desk
		Pengadaan Demplot Budidaya Udang Vename	dibahas di forum Perangkat Daerah	Diakomodir Desk

Lampiran Usulan Musrenbang Zona Dataran Tinggi

No	Kabupaten/ Kota	Usulan	Keterangan	Status
	KABUPATEN TOBA	Pengadaan Sampan/ Solu	Proposal agar disampaikan di Pemabasan lebih lanjut di forum OPD Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
		Pengadaan Alat Tangkap Jaring		Diakomodir
		Pengadaan Benih Ikan Mas	pembahasan lebih lanjut di forum opd menyesuaikan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
		Pengadaan Benih Ikan Nila	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
		Pengadaan Benih Ikan Lele	pembahasan lebih lanjut di forum opd menyesuaikan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
		Pengadaan Pakan Ikan	pembahasan lebih lanjut di forum opd menyesuaikan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
		Pengadaan Alat Tangkap Bubu	Proposal agar disampaikan di pemabahasan lebih lanjut di forum opd menyesuaikan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
	KABUPATEN KARO	Restocking bibit ikan Jurung	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
		Pengadaan Saranan Penangkapan dan Alat Tangkap	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
		Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
		Restocking bibit Ikan Nila	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir

		Pelatihan Pembudidaya Ikan Millenial	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
		Pengadaan Mesin Pakan Ikan Terapung Mandiri	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
		Pengadaan Pakan Ikan Terapung	Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
	KABUPATEN SAMOSIR	Pengadaan Benih Ikan (Lele, Nila dan Ikan Mas) 200.000 Benih	Pembahasan Lebih lanjut di forum opd, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
		Penyediaan Alat Pengolah Pakan Ikan	Pembahasan Lebih lanjut di forum opd, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
		Pengadaan Kolam Bioflok	Perlu Pembahasan lebih lanjut di forum opd menyesuaikan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
	KABUPATEN SIMALUNGUN	Bantuan sarana prasarana penangkapan ikan (Perahu, alat tangkap, pendukung penangkapan ikan, dan sarana keselamatan pelayaran)	disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
		Bantuan Restocking ikan di Danau Toba dan Perairan umum lainnya	disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
	KABUPATEN TAPANULI UTARA	Restocking	disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
		Alat Tangkap Ikan Bubu	Belum dapat diakomodir akan dibahas lebih lanjut di forum opd	belum diakomodir

		Pakan	disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
		Calon Induk Ikan Mas, Ikan Nila dan Lele Dumbo	disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
		Kolam Bioflok Ikan Lele	Belum dapat diakomodir akan dibahas lebih lanjut di forum opd	belum diakomodir
		Kolam Bioflok Nila	Belum dapat diakomodir akan dibahas lebih lanjut di forum opd	Diakomodir
		Pengadaan Sampan Bermotor	disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
		Alat Tangkap Ikan Bubu	disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
		Pengadaan Mesin Pakan Penepung	disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
		Benih Ikan	disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
		Pengadaan Kolam Bioflok	Perlu Pemabhasan lebih lanjut di forum opd, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
	KABUPATEN DAIRI	Restocking Benih Ikan Jurung 100.000 Ekor Restocking Benih Ikan Nila 100.000 ekor	menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
		Pengadaan Alat Tangkap Perikanan Berupa Jaring Insang Hanyut 100 Unit dan Bubu Lobster 100 Unit	Proposal agar disampaikan saat pembahasan lebih lanjut di forum opd menyesuaikan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir

	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	Pengadan Sampan	Proposal agar disampaikan saat pembahasan lebih lanjut di forum opd menyesuaikan kemampuan keuangan daerah	Diakomodir
--	---	-----------------	--	------------

b. Usulan Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD Provsu

c.

NO	ID USU LAN	TANGGA L USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOME NDASI MITRA	REKOME NDASI SKPD	REKOME NDASI TAPD	VOLU ME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA
406	6597 69	22-02- 2024	Megawati Zebua	Bantuan perahu	Untuk membantu masyarakat Nelayan yang belum pernah dapat bantuan alat untuk melaut	Kecamatan Luahagundre, Kabupaten Nias Selatan , Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Teruskan	mendukung prioritas daerah	-	-	50	Unit	-	Non Belanja Transfer
450	6607 61	22-02- 2024	Ahmad Hadian,S.Pd.I	Bantuan Sarana Prasarana Perikanan	dibutuhkannya bantuan di kelompok perikanan Desa Silo Bonto	Desa Silp Bonto Kec. Silau Laut , Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Teruskan	mendukung prioritas daerah	-	-	1	permin taan	-	Non Belanja Transfer
476	6613 36	22-02- 2024	Megawati Zebua	Subsidi BBM untuk Pulau-Pulau Terluar	alat transportasi laut yang jadwalnya 2 kali dalam seminggu sehingga kebutuhan Minyak untuk masyarakat Nelayan belum memadai dan harga yang diperoleh mahal	kecamatan Simuk, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Teruskan	bisa, mendukung pertumbuhan ekonomi	-	-	4	Ton	-	-

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

NO	ID USU LAN	TANGGA L USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOME NDASI MITRA	REKOME NDASI SKPD	REKOME NDASI TAPD	VOLU ME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA
552	6686 87	23-02- 2024	Dr.Meriahta Sitepu	Tambahan Modal Pembudida ya Ikan	MASYARAKAT DESA SENDANG REJO, KEC. BINJAI, KAB. LANGKAT, PROVSU ADALAH NELAYAN DIMINTA KEPADA PEMPROVSU MELALUI DINAS KOPERASI DAN UKM SUMUT UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN BERUPA MODAL DAN PERALATAN NELAYAN KEPADA KELOMPOK NELAYAN GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT	DESA SENDANG REJO, KEC. BINJAI, KAB. LANGKAT, PROVSU, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikana n	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	untuk menduku ng pertumbu han ekonomi	-	-	1	PAKET	-	Non Belanja Transfer
109 4	6784 01	24-02- 2024	H. Yahdi Khoir Harahap	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Mohon Bantuan Sampan (Perahu) Seruai Serta Alat Tangkap Ikan Jaring Gubal untuk Kolompok NELAYAN BERSAMA SEI SEMBILANG.	Desa Sei Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikana n	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	bisa untuk mrnduku ng pertumbu han ekonomi	-	-	1	Set	-	Non Belanja Transfer
110 4	6785 03	24-02- 2024	H. Yahdi Khoir Harahap	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Mohon Bantuan Alat Sarana dan Prasarana Alat Tangkap Ikan Untuk Kelompok Nelayan PUTRA MELAYU Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.	Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara., Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikana n	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	bisa untuk menduku ng pertumbu han ekonomi	-	-	1	Set	-	Non Belanja Transfer
111 2	6785 68	24-02- 2024	H. Yahdi Khoir Harahap	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Mohon Bantuan Sampan beserta alat tangkap kepada Kelompok Nelayan BERDIKARI Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara.	Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikana n	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	bisa untuk menduku ng pertumbu han ekonomi	-	-	1	Set	-	Non Belanja Transfer

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

NO	ID USU LAN	TANGGA L USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOME NDASI MITRA	REKOME NDASI SKPD	REKOME NDASI TAPD	VOLU ME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA
						Utara													
111 3	6785 86	24-02- 2024	H. Yahdi Khoir Harahap	Bantuan Pakan Ikan	Mohon Bantuan Pembuatan Tambak beserta bantuan Ikan Kerapu beserta pakan kepada Koperasi Sinar Harapan Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara.	Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikana n	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	baik menduku ng pertumbu han ekonomi	-	-	1	Set	-	Non Belanja Transfer
161 8	6962 95	26-02- 2024	Irwan Simamora,SH	Tambahan Modal Pembudid a ya Ikan	permohonan pemberian bantuan kolam terpal (Bioflok) bagi kelompok tani Desa Pardomuan Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara	Desa Pardomuan Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikana n	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	Baik untuk menduku ng pertumbu han ekonomi	-	-	10	unit	-	Non Belanja Transfer
115 4	6791 19	24-02- 2024	H. Yahdi Khoir Harahap	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Mohon Bantuan Sampan, Mesin, dan Alat Tangkap Ikan untuk Kelompok Nelayan PUTERA MELAYU Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara	Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikana n	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	Baik, untuk menduku ng pertumbu han ekonomi	-	-	1	Set	-	Non Belanja Transfer
115 9	6791 46	24-02- 2024	H. Yahdi Khoir Harahap	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Mohon Bantuan Alat Tangkap Ikan Jaring Gubal untuk Kelompok Nelayan Sinar Jaya Desa Sei Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan	Desa Sei Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikana n	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	baik untuk menduku ng pertumbu han ekonomi	-	-	1	Set	-	Non Belanja Transfer

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

NO	ID USU LAN	TANGGA L USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOME NDASI MITRA	REKOME NDASI SKPD	REKOME NDASI TAPD	VOLU ME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA
144 1	6884 48	26-02- 2024	H. Yahdi Khoir Harahap	Bantuan Pakan Ikan	Mohon Bantuan Bibit Ikan Gurami Untuk kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Dusun IV Desa Silo Lama Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan	Dusun IV Desa Silo Lama Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	baik untuk menduku ng pertumbu han ekonomi	-	-	1	Unit	-	Non Belanja Transfer
175 5	7026 49	27-02- 2024	Rahmansyah Sibarani	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Bantuan Alat Tangkap dan Asuransi untuk nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah - Kota Sibolga	Tapanuli Tengah - Sibolga, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	baik dalam menduku ng pertumbu han ekonomi	-	-	1	Paket	-	Non Belanja Transfer
176 9	7028 80	27-02- 2024	Rahmansyah Sibarani	Bantuan Sarana Prasarana Perikanan	Perbaikan TPI Perikanan Prov Sumut di Barus kabupaten Tapanuli Tengah	Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	Baik menduku ng pertumbu han ekonomi	-	-	1	Paket	-	Non Belanja Transfer
203 3	7127 04	28-02- 2024	Delpin Barus,ST	Bantuan Sarana Prasarana Perikanan	BANTUAN MESIN UNTUK PARA NELAYAN YANG ADA DESA TEBING TINGGI, KEC. TANJUNG BERINGIN, KAB. SERDANG BEDAGAI, PROVUSU, Provinsi Sumatera Utara	DESA TEBING TINGGI, KEC. TANJUNG BERINGIN, KAB. SERDANG BEDAGAI, PROVSU, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	Baik untuk menduku ng pertumbu han Ekonomi	-	-	1	PAKET	-	Non Belanja Transfer
207 5	7144 22	28-02- 2024	Rudi Alfahri Rangkuti,SH, MH	Bantuan Sarana Prasarana Perikanan	Pembuatan Tambatan Perahu / Pelataran Perahu sepanjang 50 meter di Desa Pulau Kampai, Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Desa Pulau Kampai, Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	baik untuk menduku ng pertumbu han ekonomi	-	-	50	Meter	-	Non Belanja Transfer
234 1	7201 19	28-02- 2024	Pdt. Berkat Kurniawan Laoli, S.Pd	Bantuan perahu	MASYARAKAT DESA SISARAHILIGAMO MEMINTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA MEMOHON BANTUAN PERAHU UNTUK NELAYAN	DESA SISARAHILIGA MO KECAMATAN GUNUNGSITO LI KOTA GUNUNGSITO LI, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	Baik untuk menduku ng pertumbu han ekonomi	-	-	10	Unit	-	Non Belanja Transfer

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA
2416	727648	29-02-2024	Mahyaruddin Salim B.	Bantuan Sarana Prasarana Perikanan	Masyarakat Kota Tanjungbalai meminta bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan untuk Kebutuhan Para Nelayan	Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Teruskan	Baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	-	-	600	Juta	-	Non Belanja Transfer
2434	728539	29-02-2024	H.DHODY THAHIR. SE	Bantuan Alat Tangkapan Ikan	Masyarakat memohon bantuan di bidang perikanan, dikarenakan mayoritas mata pencaharian masyarakat merupakan nelayan tradisional, dan bantuan yang dibutuhkan seperti jaring-jaring, jaring ikan tamban, kapal kayu 3 GT, bibit ikan.	Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Teruskan	baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	-	-	20	paket	-	Non Belanja Transfer
2436	728559	29-02-2024	H.DHODY THAHIR. SE	Bantuan Sarana Prasarana Perikanan	Masyarakat memohon bantuan dan solusi untuk pengolahan ikan segar agar lebih maksimal dan berkualitas ekspor. Bantuan fiber untuk pengolahan ikan dan jaringan pemasaran ikan juga diharapkan masyarakat nelayan	Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Teruskan	baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	-	-	1	paket	-	Non Belanja Transfer
2468	729937	29-02-2024	H.DHODY THAHIR. SE	Bantuan Pakan Ikan	Masyarakat perikanan memohon bantuan perikanan berupa bibit ikan yang dapat ditenakkan. Hal ini akan sangat membantu masyarakat meningkatkan ekonomi dan penghasilan	Desa Pematang Rambai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Teruskan	mendukung pertumbuhan ekonomi	-	-	10	paket	-	Non Belanja Transfer

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

NO	ID USU LAN	TANGGA L USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOME NDASI MITRA	REKOME NDASI SKPD	REKOME NDASI TAPD	VOLU ME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA
247 5	7301 35	29-02- 2024	Mahyaruddin Salim B.	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Masyarakat Nelayan meminta kepada Pemerintah Provinsi agar memberikan bantuan Alat Tangkap Ikan untuk Masyarakat Nelayan Kota Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikana n	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	menduku ng prioritas daerah	-	-	300	Juta	-	Non Belanja Transfer
247 8	7302 88	29-02- 2024	Mahyaruddin Salim B.	Bantuan perahu	Masyarakat Nelayan Kota Tanjung Balai meminta kepada Pemerintah Provinsi agar diberikan beberapa Perahu untuk masyarakat yang mata pencahariannya di laut	Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikana n	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	menduku ng pertumbu han ekonomi	-	-	50	Perahu	-	-
302 3	7381 12	01-03- 2024	Tukari Talunohi	Bantuan Alat Tangkap Ikan	MASYARAKAT NELAYAN DESA ETABU, KEC. FANAYAMA, KAB. NIAS SELATAN MEMINTA ALAT-ALAT TANGKAP IKAN.	DESA ETABU, KEC. FANAYAMA, KAB. NIAS SELATAN., Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikana n	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	menduku ng prioritas daerah	-	-	100	UNIT	-	Non Belanja Transfer
302 6	7381 42	01-03- 2024	Tukari Talunohi	Bantuan Alat Tangkap Ikan	MASYARAKAT NELAYAN DESA HILINAWALOF AU, KEC. FANAYAMA, KAB. NIAS SELATAN MEMINTA ALAT TANGKAP IKAN UNTUK PARA NELAYAN.	DESA HILINAWALOF AU, KEC. FANAYAMA, KAB. NIAS SELATAN, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikana n	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	menduku ng pertumbu han ekonomi	-	-	100	UNIT	-	Non Belanja Transfer
304 2	7382 67	01-03- 2024	Tukari Talunohi	Bantuan Alat Tangkap Ikan	MASYARAKAT MEMINTA AGAR DIBERIKAN BANTUAN KEPADA PARA NELAYAN BERUPA ALAT TANGKAP IKAN	DESA LOLOMBOLI, KEC. MAZINO, KAB. NIAS SELATAN, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikana n	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	menduku ng pertumbu han ekonomi	-	-	100	UNIT	-	Non Belanja Transfer
352 4	7700 74	06-03- 2024	DR. Timbul Sinaga,SE,M SA	Bantuan Pakan Ikan	Kurangnya modal usaha untuk mengembangkan usaha masyarakat	Dusun XII Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Diski, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikana n	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	menduku ng pertumbu han ekonomi	-	-	1000	Ekor	-	-

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

NO	ID USU LAN	TANGGA L USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOME NDASI MITRA	REKOME NDASI SKPD	REKOME NDASI TAPD	VOLU ME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA
353 2	7702 03	06-03- 2024	DRS. PENYABAR NAKHE	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Mayoritas masyarakat di Kepulauan Nias bermata pencaharian sebagai nelayan, namun sangat minim alat tangkap ikan yang dimiliki oleh masyarakat. Mohon Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memprogramkan bantuan alat tangkap ikan kepada masyarakat.	Kecamatan Afulu, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikana n	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	Disesuaik an proposal dengan yang masuk ke OPD	-	-	10	Unit	-	Non Belanja Transfer
353 3	7702 05	06-03- 2024	DRS. PENYABAR NAKHE	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Mayoritas masyarakat di Kepulauan Nias bermata pencaharian sebagai nelayan, namun sangat minim alat tangkap ikan yang dimiliki oleh masyarakat. Mohon Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memprogramkan bantuan alat tangkap ikan kepada masyarakat.	Kecamatan Sawo, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikana n	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	Disesuaik an proposal dengan yang masuk ke OPD	-	-	10	Unit	-	Non Belanja Transfer
353 5	7702 10	06-03- 2024	DRS. PENYABAR NAKHE	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Mayoritas masyarakat di Kepulauan Nias bermata pencaharian sebagai nelayan, namun sangat minim alat tangkap ikan yang dimiliki oleh masyarakat. Mohon Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memprogramkan bantuan alat tangkap ikan kepada masyarakat.	Kecamatan Lahusa, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikana n	Verifikasi Perangk at Daerah	-	Teruskan	Disesuaik an proposal dengan yang masuk ke OPD	-	-	10	Unit	-	Non Belanja Transfer

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

NO	ID USU LAN	TANGGA L USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOME NDASI MITRA	REKOME NDASI SKPD	REKOME NDASI TAPD	VOLU ME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA
353 6	7702 12	06-03- 2024	DRS. PENYABAR NAKHE	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Mayoritas masyarakat di Kepulauan Nias bermata pencaharian sebagai nelayan, namun sangat minim alat tangkap ikan yang dimiliki oleh masyarakat. Mohon Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memprogramkan bantuan alat tangkap ikan kepada masyarakat.	Kecamatan Toma, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Teruskan	Disesuai an propos al dengan yang masuk ke OPD	-	-	10	Unit	-	Non Belanja Transfer
353 8	7702 20	06-03- 2024	DRS. PENYABAR NAKHE	Bantuan Alat Tangkap Ikan	Mayoritas masyarakat di Kepulauan Nias bermata pencaharian sebagai nelayan, namun sangat minim alat tangkap ikan yang dimiliki oleh masyarakat. Mohon Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memprogramkan bantuan alat tangkap ikan kepada masyarakat.	Kecamatan Pulau-Pulau Batu dan sekitarnya, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Teruskan	Disesuai an propos al dengan yang masuk ke OPD	-	-	10	Unit	-	Non Belanja Transfer